



**PRODUKTIVITAS APARAT PEMUNGUT PAJAK
SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**(Studi Deskriptif tentang Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Di Wilayah Kecamatan Patrang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Dewi Nurtati

NIM. 950910201166

Pembimbing :

Drs. H.M. TOERKI

Asisten Pembimbing :

Drs. BOEDJONO, Msi

Asal	: Hadiah	Klasifikasi	352
	Pembelian		NUR
Terima Tgl:	16 AUG 2000		9
No. Induk :	10.2 - 810		

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

**PRODUKTIVITAS APARAT PEMUNGUT PAJAK
SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**
(Studi Deskriptif tentang Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Di Wilayah Kecamatan Patrang)

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

DEWI NURTATI
NIM : 950910201166

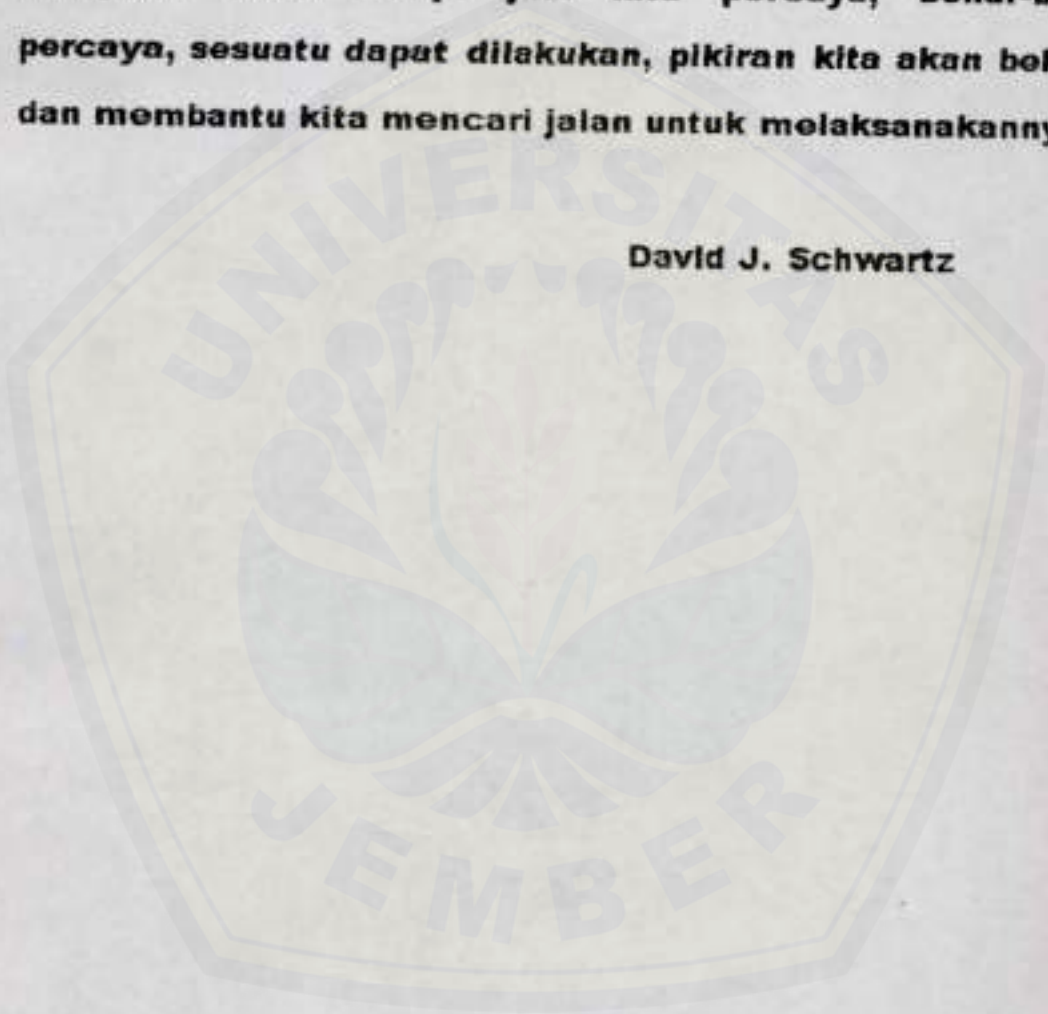
Pembimbing :
Drs. H. M. TOERKI
Asisten Pembimbing :
Drs. Boedijono, Msi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

MOTTO

Jika kita percaya sesuatu itu tidak mungkin, pikiran kita akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Akan tetapi jika kita percaya, benar-benar percaya, sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita akan bekerja dan membantu kita mencari jalan untuk melaksanakannya

David J. Schwartz



Kupersembahkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada:

***Bapak dan Ibu Soodarman atas segala doa dan jerih payahnya
Kakak dan Adik-adikku dengan segala dukungan dan pengertiannya
Agus Prastowo atas ajarannya memahami arti hidup yang sebenarnya***

PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada

Hari/ Tanggal : Sabtu, 24 Juni 2000

Jam : 08.00 - selesai

Panitia Penguji

Ketua

(Drs. Soenarjo DW)

Sekretaris

(Drs. H. M. Toerki)

Anggota

1. Drs. RK Widjadi, SU
2. Dra. Anastasia M, Msi
3. Drs. Boedijono, Msi

()
()
()

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

(Prof. Drs. H. Bariman)

NIP. 130 350 769

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Produktivitas Aparat Pemungut Pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan"** dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril dan materiil, langsung maupun tidak langsung. Atas bantuan yang diberikan, penulis menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H.M. Toerki, selaku dosen pembimbing.
2. Bapak Drs. Boedijono, Msi, selaku asisten dosen pembimbing atas segala arahan, bimbingan dan nasehat yang diberikan.
3. Bapak Prof. Drs.H. Bariman, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Sandjaya, MS, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.
6. Bapak Drs. H. Soenarjo Dw, selaku Dosen Wali penulis.
7. Bapak Drs. Suprpto, selaku Camat di Kecamatan Patrang, terima kasih atas ijin dan masukan yang diberikan.
8. Seluruh karyawan Dipenda Kecamatan Patrang.
9. Seluruh Lurah di Kecamatan Patrang, terima kasih atas bantuan yang diberikan, dan semua pihak juga ikut membantu.

10. Bapak, Ibu, Mbak Yayuk, Mas Budi, Anto, Ari serta keponakan kecilku Aditya dan Andra, terima kasih atas doa dan pengorbanan yang diberikan.
11. Agus'*singo*'Prastowo, semuanya teramat berarti, serta Keluarga di Magetan, terima kasih atas do'a dan restunya.
12. Karibku Dewi, semoga segala keinginan terkabul.
13. Teman-teman di Jawa VI-A/4 semuanya tanpa kecuali, Sulis Danik, Yeni, Buli, Rurin, Katon, Ima, Nina, Ii, Eli, Anna, Rise, Titik, Ana kecil atas segalanya semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin.
14. Semua teman-teman AN'95 terutama Rini, Hamo (makasih printernya)
Semoga Allah SWT memberikan berkah atas semua bantuan yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR TABEL

1. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang (periode lima tahun terakhir)
2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
4. Sarana dan Prasarana Sosial Budaya
5. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
6. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Periode Tahun 1999 (dikurangi permasalahan)
7. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Statusnya dalam Pemerintahan Kelurahan
8. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
9. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Lama Kerja (pengalaman)
10. Frekuensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
11. Data Prosentase Usaha
12. Data Pemberian Motivasi
13. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan
14. Target Waktu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999/2000

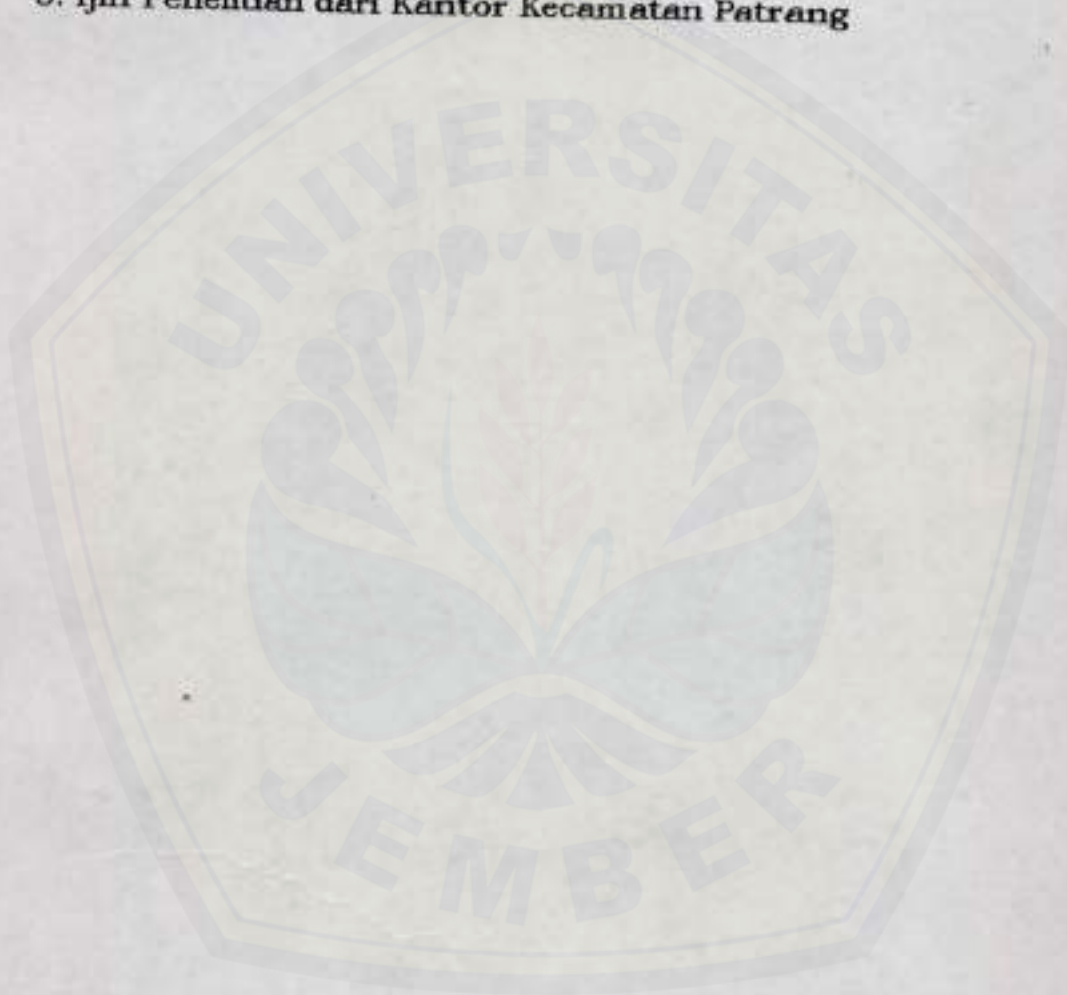
DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas
2. Diagram Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Periode Lima Tahun Terakhir



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Wilayah Kecamatan Patrang
2. Daftar Panduan Pertanyaan
3. Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
4. Ijin Penelitian dari Kasospol Tingkat II Jember
5. Ijin Penelitian dari Kantor Kecamatan Patrang



DAFTAR PUSTAKA

Halaman Judul	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Daftar Isi.....	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kerangka Teori.....	13
1.5 Pendekatan.....	26
1.6 Konsepsi Dasar.....	27
1.6.1 Konsep Produktivitas.....	29
1.6.2 Konsep Efektifitas	32
1.7 Hipotesis.....	33
1.8 Metode Penelitian.....	34
1.8.1 Metode Penelitian Deskriptif.....	35
1.8.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data.....	35
1.8.3 Sumber Data	36
1.8.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
1.8.5 Analisa dan Penafsiran Data.....	38

1.9 Definisi Operasional.....	39
1.9.1 Operasionalisasi Variabel Produktivitas.....	41
1.9.2 Operasionalisasi Variabel Efektivitas	41
II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	
2.1 Letak dan Keadaan Geografis	42
2.2 Masyarakat atau Penduduk	44
2.3 Perekonomian.....	47
2.4 Prosedur/ Tata Kerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	50
2.5 Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.....	57
2.6 Karakteristik Informan	58
III. PENYAJIAN DATA	
3.1 Pengantar	61
3.2 Variabel Produktivitas Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.....	61
3.3 Variabel Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	70
IV. ANALISA DAM INTERPRETASI DATA	
4.1 Pengantar	74
4.2 Produktivitas Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.....	75
4.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	88

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama dengan penanggulangan kemiskinan secara inkremental dan gradual telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Adanya pernyataan tersebut diatas akan turut mendukung dalam rangka untuk mengetahui secara lebih lanjut segala hal yang akan berhubungan dengan pembangunan masyarakat pedesaan. Memandang arti pembangunan bagi kehidupan manusia, maka peran serta dari pengetahuan itu sendiri tidak dapat ditinggalkan. Begitu pula dalam mempelajari pengetahuan, yang dalam hal ini lebih spesifik akan dibahas mengenai keuangan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus menerus, yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh manusia untuk mengangkat kehidupannya dari suatu kondisi tertentu pada kondisi yang dianggap lebih baik dalam rangka pembinaan bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, dimana dalam pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional dari Bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1995, yang berbunyi :

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial....

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang disebut pembangunan nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan

pembangunan nasional tersebut termaktub dalam GBHN (1993), yaitu :

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam Negara Kestuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai.

Dengan berdasarkan uraian diatas sudah jelas tertera bahwa tujuan pembangunan yang sedang Bangsa Indonesia laksanakan adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Pelaksanaan pembangunan yang sedang kita laksanakan ini adalah mempunyai tujuan jangka panjang, artinya bahwa pembangunan yang sedang kita laksanakan adalah rangkaian program-program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus dan bertahap. Sehingga untuk menuju kearah hal tersebut perlu diberikan kejelasan arah yaitu adanya kesamaan dan keselarasan yang sama atas cita-cita dari Bangsa Indonesia.

Dalam GBHN disebutkan juga bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antara daerah perkotaan dan pedesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Dinegara-negara berkembang, peranan pemerintah sangat dominan dalam pembangunan. Berbagai alasan mungkin melatarbelakangi peran yang dominan ini, seperti kekurangmampuan pihak swasta karena terbatasnya sumber dana dan sumber daya yang mereka miliki. Pada beberapa

kasus, peran dominan atau bahkan monopoli pemerintah terjadi karena adanya komitmen ideologis yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan transformasi sosial ekonomi. Tanpa keterlibatan peran pemerintah yang mendalam, mungkin perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik secara struktural akan sulit terwujud. Peran serta masyarakat dalam pembangunan juga perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonom, dengan tetap mengacu pada arah dan tujuan pembangunan nasional serta upaya perwujudan wawasan nusantara. Dengan kata lain, pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Hal ini lain karena terlalu luas dan kompleknya urusan yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Implikasinya adalah pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah, yang salah satunya dengan menerapkan sistem desentralisasi. Bowman dan Hampton (1983) menyatakan bahwa tidak ada suatu negara dengan wilayah yang luas dapat mengelola pemerintahannya secara efektif dan efisien hanya dari pusat. Untuk itu dirasa perlu adanya kebutuhan untuk membentuk pemerintahan ditingkat lokal (sub-national government), melalui kebijakan desentralisasi.

Menurut Mariun (1975:34) yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah :

Suatu sistem dalam mana bagian-bagian dari tugas negara diserahkan pada organ yang sedikit banyak mandiri (*independen*). Organ mandiri ini wajib atau berwenang melaksanakan tugasnya atas inisiatif dan menurut kebijaksanaan sendiri. Ciri yang penting bagi organ yang didesentralisasikan adalah bahwa yang mempunyai sumber-sumber sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas maka dalam pelaksanaan sistem desentralisasi terdapat beberapa hal pokok, yaitu :

- Adanya penyerahan sebagian tugas negara kepada penyelenggaranya yang mandiri sekalipun kemandirian tersebut terikat pada pedoman yang diberikan oleh yang menjalankan tugas ;
- Dengan kemandirian tersebut penerima tugas dapat dikatakan memiliki kekuasaan melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan dalam bidang tugasnya (otonomi) ;
- Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, juga dijelaskan bahwa :

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang lebih rendah menjadi urusan rumah tangganya. Perwujudan dari sistem desentralisasi tersebut adalah daerah otonom yang terdiri dari daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

Seperti juga dituangkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 bagian IV pasal 18, sebagai berikut :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.

Bagi suatu masyarakat yang majemuk, otonomi mempunyai beebagai kelebihan, karena melalui otonomi rentang kendali administrasi bisa dikurangi, sehingga administrasi bisa disederhanakan. Dalam pemungutan pajak di daerah merupakan salah satu otonomi yang diberikan pusat kepada daerah.

Dalam menjalankan hak otonominya, setiap daerah dapat saja melaksanakan prioritas kegiatannya, namun harus mampu membiayai sendiri kegiatan tersebut. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mengingat bahwa tidak semua sumber dapat diberikan kepada daerah maka daerah dituntut untuk menggali sumber kekayaannya, implikasinya semakin rendah pula ketergantungannya kepada pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang sumber keuangan daerah menurut pasal 55 UU No. 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Daerah
 4. Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain-lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sebenarnya pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti : yang penting adalah "*wewenang tepi*" artinya, memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana-sini pada tingkat jasa layanan yang disediakan. Untuk ini, mungkin sudah memadai bila 20% dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. Tetapi

sumber daya keuangan yang cukup bukan sekedar menyangkut otonomi daerah, tetapi juga mengenai apakah pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya.

Merupakan kenyataan umum bahwa kemampuan keuangan daerah amat terbatas, sedangkan untuk menjamin kelancaran urusan rumah tangganya, pemerintah daerah sangat membutuhkan dana yang cukup, tanpa adanya dana tersebut maka penyelenggaraan semua tugas dan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Pendapatan Asli Daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan pembangunan daerah, sehingga tidak berlebihan kiranya apabila pemerintah daerah menaruh harapan yang sangat besar pada sumber-sumber pendapatan asli daerah. Seperti diungkapkan oleh Thoha (1985: 27) sebagai berikut :

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mengurangi fluktuasi daerah yang dapat mengganggu perencanaan pembangunan serta untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pajak daerah perlu diperhatikan/dipertimbangkan pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan daerah.

Pasaribu (1987:16) juga mengungkapkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu perbaikan struktur keuangan dibidang non migas untuk memperkecil penerimaan bantuan luar negeri, sehingga pajak menjadi misi nasional yang tidak dapat di tawar lagi.

Pada dasarnya, baik negara maupun daerah dapat mengadakan pungutan untuk membiayai tugas-tugasnya, dan setiap tingkat pemerintahan mempunyai kewenangan atas lapangan pungutannya masing-masing. Karenanya dikembangkan suatu sistem bagi hasil pajak (*Tax Sharing System*) yang berupa penyerahan sebagian atau seluruh hasil dan pungutan negara lainnya pada daerah.

Pengaruh positif dari sistem ini adalah :

1. Daerah dapat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak negara, misalnya memberikan informasi yang luas tentang identitas wajib pajak dan obyek pajak.
2. Daerah dapat dengan mudah menghitung bagian hasil pajak negara tersebut yang akan diterima dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerahnya.

Dalam tulisan ini, lebih menitikberatkan atau menyoroti pada masalah pajak daerah khususnya mengenai efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang selama dua tahun terakhir. Hal tersebut dilatarbelakangi asumsi bahwa keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan di daerah sering menjadi kendala besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Semakin terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah semakin kecil pula otonomi yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah pusat dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada pemerintah daerah, namun karena sifat dari bantuan tersebut melekat pula batasan penggunaan dana tersebut yang sudah ditentukan prioritasnya oleh pemerintah pusat. Selain itu ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat akan mengurangi otonomi yang dimiliki daerah. Dengan berlandaskan penjelasan tersebut maka Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu jenis pajak yang unik, karena meskipun pajak ini merupakan pajak pemerintah pusat namun pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang besar didalamnya, artinya walaupun pajak ini adalah pajak pemerintah pusat tetapi bukan hanya menjadi hak sepenuhnya pemerintah pusat tetapi sebagian besar penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II. Oleh

karena itu baik pemerintah pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II berkepentingan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapat tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 1985 pasal 14 juncto UU No. 14 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menggariskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah, penagihannya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan/atau tingkat II.

Dalam prakteknya Gubernur/Bupati/Walikota tidak mungkin dapat langsung menjalankan operasi, secara teknis dibantu Dipenda dan secara operasional pelaksanaan penagihan dilaksanakan oleh kepala kelurahan beserta petugas atau aparat kelurahan yang dikoordinir dan diawasi oleh camat.

Kemampuan melaksanakan otonomi baik secara manajerial maupun keuangan tidak dapat mengabaikan pentingnya produktivitas aparat pemerintah daerah itu sendiri. Peningkatan produktivitas aparat pemerintah daerah sudah pula merupakan kebutuhan yang penting dalam memperkuat manajemen di tingkat lokal karena hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan otonomi daerah. Dengan semakin ketatnya kompetisi disegala bidang pada masa yang akan datang, maka dibutuhkan produktivitas aparat daerah yang tinggi untuk mencari peluang dan penajaman prioritas pembangunan. Dalam hal ini aparat yang diperlukan agar mampu menunjang proses dari gerak organisasi penerimaan dan pemungutan pajak adalah aparat yang produktif agar efektifitas penerimaan pajak tersebut dapat dioptimalkan sehingga memberi kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah.

Wilayah Kecamatan Patrang walaupun masuk dalam wilayah kotatiff akan tetapi kondisi wilayahnya lebih banyak mencerminkan suasana pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi



masyarakat yang relatif rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah kesadaran membayar pajak menjadi sangat minim. Dengan kondisi yang seperti ini, maka memberi dampak yang cukup berarti terhadap tinggi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut.

Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab dapat terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan sejak dini, serta keteladanan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparat negara kepada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam sektor pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah wilayah Kecamatan Patrang dalam hubungannya dengan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu dibahas dulu mengenai :

1. Kurang produktif dan terbatasnya aparat pemungut pajak menjadikan kendala yang dihadapi oleh pemerintah ditingkat Kecamatan Patrang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dari delapan kelurahan dengan 36 lingkungan yang ada di Kecamatan Patrang tersebut hanya terdiri dari 26 aparat yang berstatus PNS, sedangkan selebihnya berstatus Rollstat, sukarelawan dan ulu-ulu.
2. Efektifitas (tinggi rendahnya) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Patrang yang selama lima tahun terakhir ini tidak bisa dipenuhi sesuai dengan target bakunya. Hal ini akan berdampak terhadap kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerahnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang (kurun waktu lima tahun terakhir)

No	Tahun	Baku Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	%
1.	1995	206.593.309	169.201.804	37.391.505	81,90
2.	1996	303.543.595	213.779.542	89.755.053	70,43
3.	1997	303.789.993	206.741.862	97.048.131	68,05
4.	1998	314.802.843	208.674.450	106.128.393	66,29
5.	1999	323.112.599	210.845.017	110.900.857	65,25
Jumlah		1.465.258.194	900.341.761	563.355.695	63,21

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Fenomena diatas menjadi batu sandungan bagi pemerintah Kecamatan Patrang untuk dapat mengembangkan dan menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa melalui peningkatan kemampuan keuangan yang makin andal, efisien dan mampu memenuhi tuntutan pembangunan, penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat serta meluasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa hambatan tersebut dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang juga memiliki dampak terhadap lambatnya laju pembangunan yang sedang berjalan. Bertolak dari kenyataan ini, yang melatarbelakangi penulis untuk menjelaskan masalah "Produktifitas Aparat Pemungut pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang".

1.2 Perumusan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai nilai-nilai ilmiah maka harus menggunakan berbagai persyaratan atau prosedur penelitian yang ada, dimana masalah diungkapkan terlebih dahulu atau dirumuskan sebelum mengadakan penelitian.

Masalah merupakan aspek yang harus ada dalam penelitian, karena dengan adanya kesulitan yang dirasakan sebagai rintangan yang harus dipecahkan. Itulah yang menimbulkan seseorang mengadakan penelitian. Untuk tidak mengaburkan penelitian, masalah harus diatasi secara spesifik, sebelum membahas lebih lanjut maka perlu kita simak apa yang dikemukakan Surachmad (1990:29) tentang masalah :

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai satu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita akan berjalan terus.

Lebih lanjut Kerlinger (1990:29) mengemukakan bahwa masalah adalah satu kalimat tanya atau pertanyaan yang menanyakan apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Kerlinger juga mengungkapkan tiga kriteria masalah yang baik, yaitu (1) masalah seharusnya dinyatakan dalam hubungan dua variabel atau lebih; (2) masalah seharusnya dinyatakan secara jelas dan tidak dalam bentuk yang ambisius, masalah ini biasanya paralel dengan tujuan penelitian; (3) masalah dan pertanyaan masalah seharusnya berdasarkan uji empiris terlebih dahulu. Masih dalam hal yang sama Loedin mengemukakan bahwa masalah sebaiknya dituangkan dalam kalimat tanya.

Akhirnya berdasarkan batasan-batasan tentang perumusan masalah sebagaimana dikemukakan penulis, maka penentuan perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

"Bagaimana produktivitas aparat pemungut pajak berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang".

Seperti dikemukakan dalam latar belakang masalah bahwa pajak mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran pembangunan di daerah. Pajak menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber kekayaan yang ada didaerahnya.

Dalam rangka pengelolaan dan pemungutannya Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah Kecamatan Patrang, sukses tidaknya ditentukan oleh beberapa faktor, berdasarkan data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut : faktor dari pihak Dipenda dalam mengeluarkan SPPT, dari aparat pemungutnya, dan faktor dari masyarakat.

Sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam suatu sistem atau organisasi yang baik, peran dari pelaku atau sumber daya manusianya mempunyai posisi yang paling menentukan, maka dari itu penulis mengambil faktor yang berasal dari aparat pemungut pajak sebagai obyek penelitian dengan memfokuskan pada produktivitas kerjanya, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasinya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang dalam kegiatannya memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mendeskripsikan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang selama periode waktu tertentu.
3. Menganalisis pengaruh produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kepustakaan bagi mahasiswa atau yang berkepentingan khususnya yang akan dan sedang mengadakan aktifitas penelitian ilmiah.
2. Bermanfaat bagi organisasi atau instansi yang diteliti dan instansi lain yang berkepentingan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan masukan atau input pengetahuan dan informasi yang kemudian dapat dijadikan acuan atau landasan dasar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan efektifitas pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan dan mengemukakan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu Administrasi Negara.

1.4 Kerangka Teori

Pembangunan yang dilaksanakan didaerah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah sendiri yang tahu

kondisi secara pasti tentang kondisi daerahnya. Pembiayaan pembangunan menjadi tanggung jawab negara yang dimasukkan dalam anggaran baik anggaran nasional maupun anggaran daerah. Dalam anggaran tersebut secara umum terbagi dalam dua kelompok besar : pendapatan dan pengeluaran.

Dalam sisi pengeluaran negara dikenal adanya pengeluaran rutin misalnya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan bunga dan hutang, dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian, sarana perhubungan dan lain-lain.

Pada sisi penerimaan dalam anggaran negara, kita dapat melihat sumber-sumber penerimaan apa saja yang diharapkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran tadi. Maka kita akan mengenal penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut pengeluaran pembangunan.

Penerimaan dalam negeri terutama berasal dari pajak, baik pajak itu dari minyak dan gas bumi maupun non minyak dan gas bumi.

Penerimaan pembangunan adalah pinjaman luar negeri yang bersyarat lunak sehingga disebut juga bantuan luar negeri. Penerimaan pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutup kekurangan penerimaan yang lebih kecil dari seluruh pengeluaran agar secara akuntansi anggaran tadi berimbang. Walaupun secara akuntansi anggaran belanja selalu berimbang, tetapi secara ekonomis sebenarnya defisit. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pengeluaran pemerintah (G), lebih besar dari pajak (T), dalam keseimbangan pendapatan.

Anggaran belanja negara yang defisit bagi negara yang membangun seperti Indonesia tampaknya lebih tepat karena hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan anggaran surplus, ini berarti pajaknya lebih besar dari

pengeluaran. Dan pajak dalam keseimbangan pendapatan nasional merupakan komponen yang bersifat kontraktif (menyusutkan).

Kontek pembicaraan yang dibahas adalah dalam pendapatan dan penerimaan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak daerah sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam proses organisasi pemerintah daerah, agar bisa berjalan secara lancar dan efektif. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Manullang (1983:67) sebagai berikut :

Bagi kehidupan sebuah negara, masalah keuangan negara sangat penting, makin baik keuangan sebuah negara maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam menyanggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi sebuah pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga, pemungutan dan pengelolaannya harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin, supaya dapat memberi kontribusi untuk menunjang pembangunan nasional maupun daerah. Selama ini masih ada anggapan bahwa suksesnya pembangunan sebuah daerah tergantung pada besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Transfer dana pemerintah ke daerah biasanya berbentuk anggaran rutin dan pembangunan ataupun dalam bentuk bantuan pemerintah pusat, Daerah Tingkat I dan II.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat. Dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Dalam garis besarnya, penerimaan daerah termasuk pajak yang diserahkan hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini rendah menurut ukuran internasional meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi.

Pajak yang kini menjadi andalan APBN, peranannya diperkirakan akan menurun menjadi tinggal 65%. Padahal penerimaan pajak yang mestinya tetap menjadi andalan dalam membiayai pembangunan justru hanya menjadi pelengkap menggantikan pinjaman luar negeri yang posisinya menjadi dominan. Disisi yang lain minyak dan gas bumi juga hanya menjadi pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Dari target penerimaan dari sektor non migas sebesar 80,1 triliun tersebut bisa terealisasi dengan menggenjot penerimaan dari sektor pajak yang ditargetkan akan mencapai Rp 66,1 triliun atau 63,3% dari seluruh penerimaan dalam negeri.

Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat kontraprestasi (jasa) yang langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak. Atau dapat dikatakan bahwa pajak adalah kewajiban seorang warga negara sebagai balas jasa kepada negaranya (pemerintahnya) karena negara telah mengayomi mereka. Pajak dalam pengertian ini berangkat dari landasan berpikir bahwa tanah adalah milik negara (penguasa).

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro (1997: 3) adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, atau

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplusnya" digunakan untuk "public saving" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "public investment".

Pajak disamping merupakan kewajiban kenegaraan juga merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota masyarakat sebagai realisasi keseimbangan hak dan kewajiban membangun bangsa mengisi kemerdekaan antara lain membayar pajak. Dengan demikian mereka benar-benar memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh negara sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta secara langsung dan bersama-sama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Fungsi pajak itu sendiri menurut Tjahjono dan Muhammad F. Husain (1997: 4) adalah:

1. Fungsi Keuangan Negara (Budgetair)

Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur atau non-budgetair (Regularend)

Yaitu usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Dalam fungsi ini, pemungutan pajak digunakan:

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional amat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta semangat dan disiplin para penyelenggara dan masyarakat, maka dalam perpajakan yang sekarang diharapkan tercapainya sistem perpajakan yang berintikan kesederhanaan agar mudah dimengerti dan memberikan kepastian hukum, sehingga beban pajak selain semakin adil dan wajar, pada akhirnya diharapkan akan lebih mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dengan penuh kesadaran.

Agar maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat tercapai, perlu diperhatikan sistem pemungutan pajak yang baik. Mardiasmo (1996:8-9) membagi sistim pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang .

3. With Holding System

Sistem dengan holding adalah sistim pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak

ketiga, pihak diluar fiskus maupun wajib pajak. Lebih lanjut Munawir (1990:44-45) menambahkan bahwa sistim pemungutan pajak tidak hanya tiga macam, melainkan empat macam yaitu Semi Self Assesment System yaitu sistim pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh seseorang berada pada dua pihak yaitu pembayar pajak atau wajib pajak dan pemungut pajak atau fiskus (pemerintah).

Di Indonesia, terutama Pajak Bumi dan Bangunan kiranya sistim yang pertamalah yang digunakan sebab yang menentukan besarnya pajak adalah fiskus (pemerintah). Wajib pajak sangat pasif dalam menentukan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan, padahal dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam GBHN dapat dikatakan bahwa sistim yang dianut sebenarnya adalah pendewasaan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dalam sistim pemungutan pajak berlaku sistim Self Assesment. Akan tetapi, karena adanya berbagai faktor misalnya sikap mental dan kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran hukum para pelaksanaan hukum administrasi negara yang masih rendah, maka sistim self assesment sulit dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum serta pengetahuan hukum masyarakat maupun para pelaksana hukum dilapangan perlu ditingkatkan atau direkonstruksi.

Lebih lanjut mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 12 tahun 1985 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pendapatan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

- rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat, sesuai dengan kemampuannya.
2. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang lain atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.
 3. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam GBHN perlu diadakan pembaharuan sistim perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peran serta dan kegotongroyongan masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberi kepastian hukum.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi mencakup tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak pengairan) serta wilayah laut Republik Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik, emplasemen dan lain-lain.

Hal tersebut seperti dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 1985 (1985: 3), yang disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 1994 sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Adapun maksud ditetapkannya UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah menyederhanakan peraturan pajak yang menimbulkan banyak kesalahpahaman karena oleh rakyat dirasa menimbulkan pajak ganda. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soemitro (1986: 2) sebagai berikut:

.....jelas kiranya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu bermaksud menyederhanakan berbagai peraturan pajak yang sampai sekarang masih berlaku dan menimbulkan kesalahpahaman karena pajak itu oleh rakyat dirasa menimbulkan pajak ganda.

Dengan berlakunya UU tersebut maka pajak yang sifatnya sama dengan Pajak Bumi dan Bangunan dihapuskan, pajak-pajak tersebut antara lain pajak hasil bumi, pajak jalan, pajak rumah tangga dan pajak kekayaan.

Seperti disebutkan diatas, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan dalam operasionalisasinya melibatkan pemerintah daerah setempat, demikian halnya dengan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbangan 90% untuk pemerintah tingkat I dan Tingkat II sebagai pendapatan daerah bersangkutan sedangkan sisanya 10% merupakan bagian pemerintah pusat sebagai penerimaan negara.

Seperti juga disebutkan dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1994, bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Tingkat I/II menurut persen tertentu, yang setelah dijabarkan menghasilkan pembagian sebagai berikut: 10% untuk pemerintah pusat (sebagai kompensasi atas hapusnya penerimaan dari pajak kekayaan), 16,20% untuk pemerintah daerah Tingkat I (sebagai ganti penerimaan dari verponding Indonesia dan Ipeda), 9% sebagai

upah pungut bagi seluruh jajaran pelaksana Pajak Bumi dan Bangunan .

Dalam pasal 13 PP No. 47 Tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara;
2. 10% dari hasil penerimaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat dan harus disetor sepenuhnya ke kas negara;
3. 90% dari hasil penerimaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah;
4. Hasil penerimaan sebagaimana disebut dalam ayat (3) setelah dikurangi dengan biaya untuk melakukan pungutan sebesar 10% dibagi untuk pemerintah daerah Tingkat I dan pemerintah daerah Tingkat II dengan imbalan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah Tingkat I : 20%
 - b. Pemerintah daerah Tingkat II : 80%

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya harus dicantumkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Adapun penggunaannya diselaraskan dengan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Mekanisme tersebut diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah tempat obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini akan mencerminkan kegotongroyongan dalam pembiayaan pembangunan.

Mengenai penggunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dicantumkan dalam PP No. 7 Tahun 1985 (1985: 9) sebagai berikut:

Oleh karena sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD. Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diatas akan merangsang masyarakat didaerah letak obyek pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya akan dibahas mengenai produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini penulis mengambil faktor tersebut dengan pertimbangan bahwa sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya manusianya, selain faktor-faktor lain yang ada. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Derek Newman (dalam Moenir, 1995: 9), sebagai berikut :

Hidup dan bergerakinya organisasi berasal dari orang-orang yang ada didalamnya, baik secara pribadi maupun dalam kelompok. Bentuk organisasi seharusnya memberikan suatu kerangka kerja dan berkelanjutan terhadap gerakan atau kegiatan itu. Bentuk itu sendiri disebabkan oleh orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut.

Pada dasarnya, produktivitas mencakup sikap mental yang patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar keyakinan diri bahwa hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Sikap yang seperti ini, bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, mutlak diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan

pembangunan baik tantangan yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Tantangan-tantangan ekonomis seperti langkanya modal, langkanya ketrampilan sumber daya manusia, langkanya teknologi yang dikuasai, harus dapat diatasi dengan sikap mental yang optimis sehingga setiap insan pembangunan akan terus mencari berbagai metode dan sistem untuk mengatasinya. Tantangan non ekonomis lebih banyak dikaitkan dengan sikap dan kemauan pemerintah, sikap budaya bangsa, faktor keamanan dan ketertiban dan tekad bersama semua lapisan masyarakat untuk menciptakan kemajuan.

Kenyataan menunjukkan bahwa sumber daya aparatur di Indonesia masih mempunyai tingkat produktivitas daerah yang rendah atau belum memuaskan. Kerja produktif memerlukan ketrampilan kerja yang sesuai dengan isi kerja sehingga bisa menimbulkan penemuan-penemuan baru untuk memperbaiki cara kerja atau minimal mempertahankan cara kerja yang sudah baik. Selain itu, kerja produktif juga memerlukan prasyarat lain sebagai faktor pendukung, yaitu kemampuan kerja yang tinggi, kemauan kerja yang sesuai dengan isi kerja, lingkungan kerja yang nyaman yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, jaminan sosial yang memadai, kondisi kerja yang manusiawi dan hubungan kerja yang harmonis. Salah satu usaha yang konkrit untuk mendorong peningkatan produktivitas adalah peningkatan pendidikan dan ketrampilan. (Sinungan, 1997:3).

Lebih lanjut mengenai bahasan produktivitas, sudah menjadi kecenderungan umum sebagai akibat terjadinya peningkatan pembangunan, sikap dan ruang lingkup fungsi pemerintah juga mengalami perubahan dan perluasan. Untuk melaksanakan fungsi yang makin luas dan kompleks maka sektor pemerintah tentu memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai dalam arti sumber daya

yang mempunyai kemampuan dan produktivitas yang tinggi. Produktivitas itu sendiri dapat berarti sebagai kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan pendapatan pada satu satuan waktu kerja.

Batasan mengenai produktivitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan masing-masing organisasi (misalnya, untuk *profit* ataukah *costumer satisfaction*), juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri (misalnya, organisasi publik versus organisasi swasta, organisasi bisnis versus organisasi sosial dan organisasi keagamaan).

Berbagai ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi dan efektifitas sering dihubungkan dengan produktivitas, secara umum produktivitas dikemukakan orang dengan menunjuk pada rasio output terhadap input. Hal serupa dikemukakan oleh Cook (dalam Shobaruddin, dkk: 17) yang mengatakan bahwa produktivitas adalah suatu ukuran efisiensi, dengan melihat pada rasio input terutama tenaga kerja, dengan unit outputnya. (*Productivity is one measure of efficiency, looking at the ratio of input cost, particularly labour cost, to units of output*).

Sedangkan Dulworth dan Taylor (ibid) menyebutkan bahwa produktivitas merupakan hubungan antara output yang berupa barang atau jasa dengan input. (*The relationship between output of product and services and input of resources. Output divided by input*).

Jadi produktivitas adalah membandingkan antara input yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Input disini bisa berupa manusia, uang, teknologi. Sedangkan outputnya merupakan suatu produk tertentu ataupun bentuk-bentuk pelayanan jasa yang diberikan.

Klingner dan Nanbaldian (Gomes, 1999: 160) juga menyebutkan bahwa dalam mengukur produktivitas tersebut

2. Organisasi sebagai sekelompok orang, menurut Davis (Liang Gie, 1974: 63) adalah

Any group of individual that is working toward some common end order leadership. (Suatu kelompok orang yang sedang bekerja kearah sesuatu tujuan bersama dibawah kepemimpinan).

3. Organisasi sebagai proses pembagian kerja, menurut Pfiffner dan Lane (Liang Gie, 1974: 66) adalah :

Organization is the process of combining the work which individuals or groups have to perform with the faculties necessary for it to execution, so that the duties so performed provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and coordinated application of effort. (Organisasi adalah proses menggabungkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu, sehingga kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggaraan usaha yang efisien teratur, positif dan dikoordinasikan).

Dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, penulis menggunakan pendekatan organisatoris dengan menitikberatkan pada perilaku orang-orang yang menjadi obyek dalam penelitian ini dalam mencapai tujuan bersama atau organisasi.

1.6 Konsepsi Dasar

Konsep merupakan unsur penelitian terpenting dan merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial tertentu. Peneliti harus memahami konsep-konsep yang dipergunakan dalam kerja penelitiannya, karena dengan pemahaman ilmiah maka peneliti akan secara jelas dan tegas dalam menggambarkan fenomena

yang hendak ditampilkan disamping akan lebih mampu mendudukan permasalahan yang dipilihnya kedalam kerangka pemikiran yang tertata.

Dalam rangka kegiatan penelitian ini mulai dari awal sampai akhir harus mengikuti kerangka pemikiran yang utuh guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Dalam rangka membahas masalah diperlukan sebuah konsep atau pandangan teoritis yang jelas dan benar. Untuk itu keberadaan sebuah teori sangat membantu karena teori menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1987:37) sebagai berikut :

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Dari rumusan teori diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa teori adalah serangkaian konsep atau bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti.

Menurut Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:33) yang dimaksud dengan konsep adalah :

✓ Serangkaian abstraksi mengenai sebuah fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sekelompok karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Pengertian konsepsi dasar menurut Supranto (1988:10) adalah sebagai berikut :

Konsepsi dasar adalah pandangan yang teoritis dari definisi singkat yang mendasari pemikiran kita guna mencapai jalan keluarnya atau sebuah pemecahan dari persoalan yang perlu diselidiki. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa atau gejala.

Dengan pendapat diatas jelas bahwa konsepsi dasar sangat penting karena dapat memberikan kerangka berpikir yang kuat sebagai dasar maupun landasan untuk pemecahan masalah.

Berkaitan dengan pemecahan masalah yang harus dihadapi maka konsep yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Konsep produktivitas sebagai variabel pengaruh (X)
2. Konsep efektifitas sebagai variabel terpengaruh (Y)

1.6.1 Konsep Produktivitas (X)

Sumber daya manusia merupakan sebuah aset penting bagi sebuah organisasi lebih-lebih bagi organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Oleh karena itu peningkatan produktivitas pegawai merupakan sebuah isu yang cukup penting dalam setiap kegiatan organisasi dan perlu mendapat penanganan serius. Apabila produktivitas tercapai maka akan tercapai juga efisiensi dan efektifitas organisasi.

Hidayat (1986:15) mengutip pendapat Lampman yang dituangkan dalam makalahnya ketika disampaikan dalam Kongres Produktivitas Dunia V di Jakarta, April 1986 mengatakan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia termasuk rendah atau sebesar 17%. Osborne dan Gaegler (1992:195) mempertegas bahwa setiap unit pemerintah dituntut sekecil mungkin untuk membelanjakan dana yang amat terbatas tetapi berupaya meningkatkan produktivitas dengan mengarahkan kegiatannya untuk mencapai profit dengan cara privatisasi.

Peningkatan produktivitas merupakan isu utama dalam setiap kegiatan organisasi, dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Apabila produktivitas tercapai maka akan tercapai pula efisiensi dan efektifitas organisasi. Adanya peningkatan produktivitas akan terlihat dari potensi, pengadaan barang dan jasa dalam jumlah lebih besar persatuan kerja.

Konsep produktivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi obyek penelitian adalah pendapat dari Klingner dan Nanbaldian (Gomes, 1999: 160) yang menyatakan bahwa :

Produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha (*effort*) pegawai, yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan (*ability*) pegawai, yang diperoleh melalui latihan-latihan.

Konsep tersebut memunculkan beberapa indikator, yaitu :

1. Usaha pegawai (*effort*)
2. Motivasi yang tinggi
3. Kemampuan pegawai (*ability*)

a. Usaha Pegawai

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia , yang dimaksud dengan usaha adalah :

Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud : pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Jadi yang dimaksud dengan usaha pegawai adalah segala kegiatan dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sehingga tercapai tujuannya.

b. Motivasi yang Tinggi

Menurut William G. Scott (Moenir, 1995: 82) motivasi diartikan adalah sebagai berikut :

Motivasi secara tradisional diartikan oleh para penulis management sebagai suatu proses yang mendorong orang-orang untuk berbuat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam lingkungan kepegawaian dikenal dua jenis motivasi yang ditinjau dari sifatnya, ialah motivasi positif dan motivasi negatif. Yang dimaksud dengan motivasi positif yaitu suatu dorongan yang mampu menimbulkan harapan pada seseorang,

sehingga ia melakukan perbuatan dengan maksud mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Motivasi positif memungkinkan seseorang bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga hasil pekerjaannya akan dapat memuaskan. Seperti dinyatakan oleh Scott sebagai berikut :

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan teknik dalam pemberian motivasi positif menghasilkan tidak hanya kepuasan manusiawi tetapi juga produktivitas yang meningkat.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Gellerman (1984:47) yang menyatakan bahwa akar produktivitas adalah motivasi. Ini berarti bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai atau tenaga kerja motivasi mutlak diperlukan.

Adapun yang dimaksud dengan motivasi negatif adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu perubahan bukan untuk kepentingannya, tetapi karena adanya rasa takut. Dengan demikian dalam motivasi negatif ini terdapat unsur paksaan untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan motivasi demikian pegawai tidak dapat diharapkan berkembang dengan baik, mempunyai inisiatif dan dinamis, melainkan akan menjurus menjadi statis.

Disisi lain, Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan manusia menjadi, tingkat pertama kebutuhan manusia adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan (*physical comfort*). Tingkat yang lebih tinggi adalah kebutuhan akan keamanan dan keselamatan (*security*). Tingkat berikutnya adalah kebutuhan untuk diterima dalam pergaulan sosial (*social acceptance*). Kemudian kebutuhan akan penghargaan dan gengsi (*personal esteem*), dan akhirnya kebutuhan akan pernyataan atau pemenuhan diri (*self realization or fulfillment*), yang terletak dipuncak hierarki.

Maslow juga menegaskan bahwa para pegawai akan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan tujuan memperoleh imbalan gaji/upah yang lebih besar sebagai motivasi pada tingkat yang paling rendah, hingga mencapai tingkat yang paling tinggi.

c. Kemampuan Pegawai

Menurut Moenir (1995:76) yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungannya dengan pekerjaan ialah suatu keadaan pada seseorang yang dengan penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

1.6.2 Konsep Efektifitas

Efektifitas organisasi ditentukan oleh apakah tujuan yang hendak dicapai dapat terealisasikan atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrawijaya (1989:225) yaitu :

Untuk menilai apakah tujuan organisasi efektif atau tidak secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan itu dicapai dengan baik atau tidak.

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dimengerti bahwa hakikat dari efektifitas adalah dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dalam organisasi pencapaian tujuan ini ditentukan melalui kerjasama orang-orang yang terlibat didalamnya.

Seperti dikemukakan oleh Emerson (dalam Handayani, 1989) yang mengemukakan pendapatnya bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tercapainya tujuan ini adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh besar terhadap yang dikehendaki.

Hidayat (1986: 87) juga mengemukakan bahwa :

Efektifitas adalah sebuah ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target telah dicapai. Semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektifitasnya.

Dalam hubungannya dengan topik dalam penelitian ini untuk menentukan keberhasilan atau efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari kesesuaian antara target dengan hasil yang dicapai.

1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dan merupakan suatu rumusan yang menyatakan dugaan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi (1991:43) sebagai berikut :

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dan teori sebagai hasil deduksi dari teori atau preposisi, hipotesis lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap diuji secara empirik.

Sedangkan Suharsimi (1993:62) memberikan definisi hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Adapun kriteria hipotesis diungkapkan oleh Moeljarto sebagai berikut :

1. Mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih.
2. Memungkinkan pengukuran atau pembuktian empirik.
3. Di luar jangkauan judgement, penelitian hipotesis.
4. Secara konseptual harus jelas dan ini berhubungan dengan tujuan secara jelas tidaknya teori yang diungkapkan.

5. Tujuannya harus spesifik sehingga dapat diungkapkan kebenarannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas serta mengacu pada perumusan masalah dan kerangka teori yang kemukakan, maka penulis mengemukakan hipotesis, sehubungan dengan permasalahan didepan.

Adapun hipotesa penulis adalah bahwa efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan terus menerus diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah produktivitas aparat pemungut pajaknya.

1.8 Metode Penelitian

Didalam suatu riset diperlukan adanya metode penelitian yang dijadikan landasan bergerak untuk memperoleh data dan merupakan sarana yang penting dalam rangka mencari, menemukan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Kebenaran ilmiah dapat diperoleh apabila telah diuji secara nyata dan diungkapkan melalui metode atau prosedur ilmiah, yang jelas sistematis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi ilmiah.

Berkaitan dengan metode penelitian ini Koentjaraningrat (1980:116) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara-cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian menurut Sutrisno (1982:4), sebagai berikut :

Adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.

Lebih lanjut Winarno mengemukakan tentang pengertian metode sebagai berikut :

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencari suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu.

Berpijak dari uraian diatas, maka dalam hal ini penulis mempergunakan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Deskriptif
2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
3. Sumber Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Analisis Data dan Penafsiran Data

1.8.1 Metode Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang berarti "Metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang" (Nasir, 1985). Secara ringkas metode ini digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini menginginkan adanya akumulasi data dasar belaka. Karena dalam penelitian deskriptif peneliti bisa pula membandingkan fenomena sosial tertentu, mengadakan klasifikasi serta dapat pula menetapkan standar atau norma tertentu. Hal inilah yang mendasari penelitian deskriptif disebut pula penelitian survei normatif.

1.8.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data (*trustworthiness*) menurut Moelong (1990) diperlukan teknik pemeriksaan yang dalam hal ini didasarkan pada empat kriteria yang digunakan, yaitu (1) derajat kepercayaan, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, (4) kepastian. Untuk memenuhi kriteria itu, dalam penelitian ini mengikuti petunjuk Moelong antara lain dengan cara :

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan kata lain ketekunan pengamatan berkaitan dengan fenomena kedalaman penelitian (*validitas internal*). Dalam hal ini disadari sangat subyektif, dalam arti sangat tergantung pada kemampuan peneliti menangkap sebuah fenomena.

b. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Dalam hal ini Denzin (1979) ada empat teknik yang digunakan, yaitu berdasarkan sumber, metode, penyelidik, dan teori. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya digunakan dua teknik triangulasi, yaitu menggunakan teori dan sumber.

c. Kecukupan Referensi

Teknik ini digunakan untuk menilai validitas data dan berfungsi sebagai referensi dalam analisis dan penafsiran data. Untuk itu sangat erat hubungannya dengan data yang digunakan dan yang akan digali.

d. Uraian secara Rinci

Upaya ini dilakukan dengan membuat pelaporan secara teliti dan cermat, yang dapat menggambarkan konteks penelitian. Hal ini dilakukan sejak penyajian data sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data primer yang berasal dari key informan untuk dianalisa, dengan didukung oleh data sekunder yang berasal dari dokumen atau arsip. Adapun hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai sumber

pembandingan ataupun pendukung penggambaran, interpretasi dan menafsirkan situasi.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Yang dimaksud observasi menurut Sutrisno (1989:16) adalah :

Observasi adalah biasa dan diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang dihadapi.

Jadi dalam observasi ini penulis mengadakan pengamatan secara tidak langsung maupun langsung. Dalam penelitian ini metode observasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui pengamatan dan penentuan secara sistematis terhadap fakta-fakta dan gejala-gejala yang terdapat dalam obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan metode ini harus mengandalkan benar-benar kepada kepekaan indera (utamanya mata dan telinga). Kecermatan dan kejelian dalam membedakan antara suatu peristiwa yang harus diikuti secara seksama.

b. Teknik Dokumentasi

Manfaat dokumentasi menurut Sutrisno Hadi adalah :

Untuk membantu peneliti dalam memperoleh pengetahuan yang didapat dengan gejala yang dipelajari dengan membantu penyusunan persoalan untuk meneliti dan membuat kesempatan dan memperluas pengetahuan ilmiah.

Dari pendapat tersebut maka digunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersifat sekunder sehingga data dapat diperoleh secara lengkap.

c. Teknik Interview

Mengenai interview atau wawancara, Surachmad (1990: 30) berpendapat sebagai berikut :

Interview menghendaki komunikasi secara langsung dengan subyek. Memang cara yang paling lazim dan paling efektif adalah interview pribadi. Karena mudah tampaknya dari luar bahwa untuk itu perlu sekali terjadi perhubungan yang lancar antara kedua orang itu, setiap hari mereka harus mempergunakan bahasa dan pengertian yang sama, pendapat dengan jelas dan berada dalam keadaan biasa, tanpa tekanan dan tanpa gangguan luar.

Metode ini dipakai penulis dalam rangka mencari data-data primer yang harus mereka sampaikan secara individu, yang tidak mungkin dijaring dengan cara observasi.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara langsung dengan informan melalui instrumen kuesioner yang bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dilengkapi juga dengan pengamatan langsung dan wawancara mendalam yang bersifat terbuka dengan key informan.

1.8.5 Analisis dan Penafsiran Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, analisis dan penafsiran data merupakan tahap paling sulit dan memerlukan ketekunan tersendiri. Analisis data digunakan teknik kualitatif, dengan menafsirkan atau interpretasi. Dalam langkah interpretasi ini ada dua aspek, pertama untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian, dalam arti menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan lainnya. Kedua, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Adapun perincian analisa meliputi :

a. Reduksi Data

Karena data masih bersifat acak dan tumpang tindih, maka perlu direduksi, dirangkum, dipilah pada pokok-pokok persoalannya. Dengan demikian susunan data akan sistematis

dan mudah dikendalikan serta dapat memberikan gambaran tentang hasil yang sudah dicapai.

b. Penampilan Data

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian berdasarkan banyaknya data dan laporan pengamatan, yang digunakan untuk membuat, memprosentase, membandingkan atau dengan cara lainnya.

c. Kategori Data

Fungsi dari pengkategorian data adalah dalam proses interaksi data. Untuk itu perlu adanya pengkategorian data berdasarkan pikiran, situasi atau kriteria tertentu. Hal ini antara lain dapat dimanfaatkan sebagai (1) mengelompokkan antar unit data kedalam bagian-bagian yang isinya jelas dan saling berkaitan. (2) pemeriksaan keabsahan data. (3) Agar setiap kategori yang telah disusun, tetap mengikuti prinsip taat asas.

Tujuan interpretasi data adalah untuk deskripsi analitik dan penyusunan teori substantif serta pendeskripsian semata-mata. Pada deskripsi semata-mata, analisa menerima dan menggunakan rancangan organisasional yang sudah tersedia dalam suatu disiplin ilmu. Sedang dalam deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang berasal dari data, kemudian barulah menuju pembentukan teori substantif. Meskipun tujuan utama penafsiran data adalah pembentukan teori substantif, perolehan teori yang baru, tetapi dalam penelitian ini hanya dilaksanakan sampai pembuktian hipotesis secara deskriptif kualitatif..

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penuntun bagi peneliti dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dikarenakan variabel penelitian masih bersifat abstrak, maka

perlu dioperasionalkan sehingga dapat diukur secara empiris dalam rangka membatasi secara tegas konsep atau variabel yang dirumuskan. Disamping itu definisi operasional merupakan penjabaran konsep-konsep dari variabel-variabel yang memudahkan peneliti mengukur dan menganalisa data.

Untuk memperjelas bagaimana suatu variabel akan diukur, maka kita masih memerlukan variabel tersebut untuk kemudian dibagi-bagi dalam indikator. Selanjutnya dari indikator itu dapat ditarik item-item atau gejala-gejala apa yang mungkin timbul.

Hal ini sesuai dengan pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi (1991: 46) yang menyatakan bahwa :

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memaparkan mengenai konsep-konsep dari masing-masing variabel sehingga jelas indikator dari masing-masing variabel tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Operasionalisasi variabel bebas (X), yaitu Produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang.
2. Operasionalisasi variabel terikat (Y), yaitu Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang.

1.9.1 Operasionalisasi Variabel Produktivitas Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang (X).

Konsep produktivitas menurut Klingner dan Nanbaldian (Gomes, 1999: 160) adalah sebagai berikut :

Produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha (effort) pegawai, yang didukung dengan motivasi yang tinggi dengan kemampuan (ability) pegawai, yang diperoleh melalui latihan-latihan.

Jadi produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksudkan mempunyai indikator sebagai berikut :

- a) Motivasi (X1)
- b) Kemampuan (X2)
- c) Usaha (X3)

1.9.2 Operasionalisasi Variabel Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang (Y)

Yang dimaksud efektifitas dalam penelitian ini seperti dikemukakan oleh Hidayat (1986: 87) sebagai berikut :

Efektifitas adalah sebuah ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target telah tercapai. Semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektifitasnya.

Konsep tersebut memunculkan indikator sebagai berikut :

- a) Kesesuaian target dengan realisasi (Y)

II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Deskripsi daerah penelitian ini merupakan suatu gambaran daerah obyek penelitian yang penulis paparkan dengan tujuan untuk melengkapi data yang terhimpun didalamnya dan diharapkan untuk membantu penulis dalam menganalisis data lebih lanjut. Dengan demikian akan mempunyai nilai yang sangat penting, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkannya untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan atau kondisi daerah yang menjadi obyek penelitian ini.

Penyajian daerah penelitian ini juga penulis maksudkan untuk acuan dalam menginterpretasikan data yang telah terhimpun, sehingga dengan demikian akan memperoleh suatu interpretasi data yang dapat dipertanggungjawabkan dan terakumulasi.

Untuk memenuhi keperluan dalam penyajian data tentang deskripsi daerah penelitian ini, penulis berusaha untuk menghimpun data secara lengkap dan sistematis, maka dibawah ini akan disajikan secara rinci urutan sebagai berikut :

- Letak dan Keadaan Geografi
- Kondisi Masyarakat/ Penduduk
- Perekonomian

2.1 Letak dan Keadaan Geografi

Kecamatan Patrang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kotatiff Jember dengan luas areal seluruhnya meliputi 3.644.400 Ha, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan; 36 lingkungan; 116 RW; 374 RT, yaitu Kelurahan Gebang, Jember Lor, Patrang, Baratan, Bintoro, Slawu, Jumerto dan Banjar Sengon.

Berdasarkan penggunaan tanahnya luas wilayah Kecamatan Patrang terdiri dari :

1. Sawah Teknis : 1.371.000 Ha;
2. Sawah $\frac{1}{2}$ Teknis : 319.000 Ha;
3. Non Teknis : 333.000 Ha;
4. Tegalan : 94.500 Ha;
5. Pemukiman : 665.000 Ha;
6. Lain-lain : 120.000 Ha.

Secara geografis wilayah Kecamatan Patrang mempunyai kondisi yang sangat potensial sebagai daerah pertanian, di tunjukkan dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi dan suhu yang mendukung, hanya masalahnya jumlah petani yang mau mengusahakan tanahnya semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, karena hasil yang diperoleh kurang bisa diharapkan untuk menunjang kebutuhan mereka. Secara tata letak wilayah Kecamatan Patrang berada pada :

- a). Ketinggian dari permukaan laut : 95 m
- b). Banyaknya curah hujan : 2324 mm/th
- c). Topografi : dataran
- d). Suhu rata-rata : 24-32 °C

Sedangkan rangkaian panjang dan lebar wilayah Kecamatan Patrang dibatasi wilayah-wilayah lain yaitu :

- a). Sebalah Utara : Kecamatan Arjasa
- b). Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwates
- c). Sebelah Timur : Kecamatan Sumbersari
- d). Sebelah Barat : Kecamatan Sukorambi

2.2 Masyarakat atau Penduduk

Masyarakat atau penduduk diwilayah Kecamatan Patrang yang berjumlah sekitar 85.155 jiwa ini mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, hal ini didukung dengan data-data yang penulis peroleh, yang ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah Kecamatan Patrang

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum Sekolah	8.767	17 %
2.	Tidak tamat sekolah	20.225	40 %
3.	Tamat SD/ sederajat	19.573	39 %
4.	Tamat SLTP/ sederajat	14.496	29 %
5.	Tamat SLTA/ sederajat	13.569	26 %
6.	Tamat Akademi/ sederajat	2.920	6 %
7.	Tamat PT/ sederajat	1.453	3 %
Jumlah		50.660	100 %

Sumber : Monografi Kecamatan Patrang Tahun 1999

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Wilayah Kecamatan Patrang termasuk kategori tinggi mengingat hampir 80 % masyarakatnya sudah mengenal baca tulis. Hal tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya yang kebanyakan berprofesi sebagai pegawai. Hal tersebut ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 3. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian di Wilayah Kecamatan Patrang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	5.550	11 %
2.	Buruh Tani	3.932	7 %
3.	Buruh Industri	3.699	7 %
4.	Pedagang	5.323	10 %
5.	Pengangkutan	1.124	2 %
6.	Pegawai Negeri Sipil	14.647	28 %
7.	ABRI	4.831	9 %
8.	Pensiunan (Peg. Neg/ABRI)	10.132	19 %
9.	Peternak	1.976	4 %
10.	Lain-lain	1.577	3 %
Jumlah		52.598	100 %

Sumber : Monografi Kecamatan Patrang Tahun 1999

Selain kondisi pendidikan dan mata pencaharian yang cukup memadai, juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana lain yang juga mencukupi. Seperti sarana sosial dan budaya yang ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 4. Sarana Dan Prasarana Sosial Budaya di Wilayah Kecamatan Patrang

No	Jenis	Jumlah
1.	Pendidikan	
	a. TK	10 buah
	b. SD/ sederajat	50 buah
	c. SLB	1 buah
	d.SMP/ sederajat	6 buah
	e.SMU/ sederajat	15 buah
	f. Perg. Tinggi/ Akademi/ Kursus	19 buah
2.	Tempat Ibadah	
	a. Masjid	86 buah
	b. MUshola	358 buah
	c. Gereja	5 buah
	d. Kuil/ Pura	1 buah
3.	Pariwisata	
	a. Penginapan	3 buah
	b. Perkump. Budaya/ Kesenian	19 buah
	c. Restoran	2 buah
4.	Kesehatan	
	a. RSU	4 buah
	b. RS Khusus Pemerintah	1 buah
	c. RS Bersalin	12 buah
	d. Poliklinik	2 buah
	e. Puskesmas	6 buah
	f. Apotik	6 buah
	g. Sanatorium	3 buah
5.	Pondok Pesantren	6 buah
6.	Majelis Taklim	63 buah

Sumber : Monografi Kecamatan Patrang 1999

Dengan melihat proyeksi keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan maupun menurut mata pencaharian serta tersedianya sarana dan prasarana sosial dan budaya tersebut, maka dapat dipaparkan bahwa masyarakat diwilayah Kecamatan Patrang mempunyai taraf kehidupan yang sudah memadai dan maju. Hal ini berarti bahwa kemampuan penduduk atau masyarakat untuk menerima atau menangkap suatu kemajuan sudah dapat diandalkan.

2.3 Perekonomian

Bertolak dari kondisi fisik dan potensi kependudukan wilayah Kecamatan Patrang, sebagaimana telah diuraikan terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Patrang mempunyai taraf kehidupan yang relatif baik meskipun tidak seluruh kelurahan. Dari delapan kelurahan yang ada tersebut ada empat kelurahan yang mempunyai kondisi sosial ekonomi relatif rendah, yaitu Kelurahan Bintoro, Slawu, Jumerto dan Kelurahan Banjar Sengon. Faktor yang menyebabkan antara lain adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Tingkat II Jember terhadap perubahan di wilayah pedesaan, hal ini terbukti dari jumlah anggaran yang semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dilain pihak pemerintah kecamatan juga belum mampu membiayai pembangunan diwilayahnya sendiri.

Penyelenggaraan pembangunan didaerah tidak hanya melulu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat tetapi juga dari kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui kesadarannya membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya kesadaran membayar pajak tersebut secara riil dapat dilihat dari penerimaan pajak itu sendiri yang justru mengalami penurunan dari tahun

ketahun. Hal tersebut dapat kita lihat melalui daftar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan lima tahun terakhir.

Tabel 5. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang

No	Tahun	Baku Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	%
1.	1995	206.593.309	169.201.804	37.361.505	81,90
2.	1996	303.543.595	213.779.542	89.755.053	70,43
3.	1997	303.789.993	206.741.862	97.048.131	68,05
4.	1998	314.112.599	208.674.450	106.128.393	66,29
5.	1999	323.112.599	210.845.017	110.900.857	65,25
Jumlah		1.465.258.194	900.341.761	563.355.695	63,21

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Untuk lebih melengkapi data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang berikut juga penulis sertakan data dari masing-masing kelurahan selama periode tahun 1999.

Tabel 6. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 (dikurangi permasalahan)
s/d 31 Maret 2000

No.	Kelurahan	Baku/Target		Realisasi		Sisa/Tunggakan		%
		WP	Rp	WP	Rp	WP	Rp	
1.	Gebang	6.953	65.721.432	4.620	47.445.736	2.578	16.447.912	74,97
2.	Jember Lor	5.231	112.616.784	2.546	84.360.134	2.605	28.256.650	74,91
3.	Patrang	4.794	63.734.600	2.517	41.652.264	2.277	22.082.336	65,35
4.	Baratan	3.763	34.094.006	2.160	21.451.894	1.603	12.642.112	62,92
5.	Bintoro	4.221	21.271.800	2.401	14.822.012	1.820	6.395.788	69,86
6.	Slawu	2.137	13.177.466	1.497	10.716.256	640	2.461.210	81,32
7.	Jurnerto	1.921	10.415.506	1.770	9.048.781	151	1.366.725	86,88
8.	Banjar Sengon	2.092	9.916.847	637	6.316.481	1.455	3.600.366	63,69
Jumlah		31.095	330.948.441	18.148	253.813.558	13.129	93.253.099	72,49

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Data tersebut menunjukkan bahwa hampir diseluruh kelurahan di Kecamatan Patrang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa mencapai 100 %, hal ini menurut pihak Dipenda disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat baik yang disebabkan karena kondisi sosial ekonominya yang kurang maupun karena kurang produktifnya aparat pemungut pajak itu sendiri, atau bisa juga disebabkan adanya sanksi yang kurang tegas atau jelas terhadap para wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Sedangkan faktor yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah masalah produktivitas aparat pemungut pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4 Prosedur/ Tata Kerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang

Didalam mensukseskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Patrang perlu adanya dukungan dari personel/petugas yang berkualitas serta mempunyai etos kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu sebelum operasional dilaksanakan perlu penataan personil/petugas yang akan disertai tanggung jawab yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan wilayah/kapling-kapling yang telah direncanakan.

Suksesnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang didukung oleh personil behumlah cukup tanpa adanya penyelenggaraan administrasi yang baik serta peran serta dari masyarakat khususnya kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Ada beberapa prosedur administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka membantu kelancaran kegiatan administrasi itu sendiri, yang antara lain adalah :

I. Penerimaan SPPT

1. Kegiatan ditingkat Kelurahan

- a. SPPT yang telah diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera diadakan penelitian ulang terhadap jumlah SPPT maupun jumlah ketetapannya dengan yang tertera dalam Berita Acara;
- b. Diklasifikasikan/dipilah perlingkungan dan disusun perblok kemudian dijumlah untuk menentukan jumlah baku perlingkungan/petugas pemungut;
- c. Kemudian SPPT yang telah dikelompokkan tersebut diserahkan pada Kepala Lingkungan/petugas pemungut dengan memakai Berita Acara penyerahan;
- d. Proses penelitian dan pemilahan dengan batas waktu tidak lebih dari satu (1) minggu.

2. Kegiatan di Tingkat Lingkungan

a. SPPT yang telah diterima diteliti kembali :

- * Salah Nama
- * Alamat tidak jelas/tidak diketahui
- * Keliru Data
- * Penetapan terlalu kecil tidak sesuai dengan obyek yang ada
- * Dobel Anslah
- * Sarana Umum
- * SPPT yang bermasalah tersebut diinventarisir dan dilaporkan secara kolektif oleh Lurah ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan blangko yang telah disediakan oleh KP.Pajak Bumi dan Bangunan Jember yang dilampiri data pendukung.

- b. SPPT yang sudah dianggap benar dicatat/dibukukan dalam DHKP Pembantu kemudian dijumlah;
- c. Kegiatan selanjutnya, SPPT dalam waktu singkat segera disampaikan pada wajib pajak untuk mengoreksi kebenaran data dalam SPPT dan sebelumnya wajib pajak harus menandatangani struk yang terletak dibagian bawah SPPT, kemudian struk tersebut dihimpun oleh petugas untuk diserahkan ke Dipenda Tingkat II Jember lewat Kecamatan;
- d. Batas waktu proses dan penelitian SPPT tidak lebih dari satu (1) bulan setelah SPPT diterima dari kelurahan.

II. Penerimaan/Pungutan dan Penyetoran

1. Untuk kelancaran serta mempercepat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan , walaupun jatuh tempo pembayaran telah ditetapkan dalam SPPT, wajib pajak perlu dihimbau untuk membayar lebih awal karena kebutuhan dana pembangunan harus tersedia sejak awal tahun anggaran;
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat langsung dilaksanakan pada Bank Persepsi yang telah ditentukan (BPD Jatim), atau pada petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Kelurahan;
3. Setiap pembayaran yang diterima oleh petugas harus menggunakan TTS (Tanda Terima Sementara) diisi secara lengkap ditandatangani kemudian dicatat dalam buku penerimaan :
 - * Nama Wajib Pajak;
 - * Alamat/RT/RW;
 - * Nomor seri SPPT;
 - * Tahun Pajak;
 - * Jumlah pembayaran;
4. Hasil dari semua penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam waktu 24 jam (1 hari) harus disetorkan ke BKP Kelurahan

dengan menggunakan daftar Penerimaan Harian (DPH) dan Buku Penerimaan Harian yang ditandatangani penyettor maupun BKP sebagai penerima. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak terhutang belum dibayar lunas, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 11 ayat (3), (4), (5) UU No. 12 Tahun 1985 berupa denda 2% perbulan atau tagihan dengan surat paksa sesuai UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa;

5. Tugas Bendaharawa Khusus Penerima (BKP) :

1. Menerima dan mencatat setoran dari petugas pemungut;
2. Mencatat/membukukan wajib pajak yang telah membayar ke dalam DHKP;
3. Menyetorkan semua hasil penerimaan ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk dengan menggunakan DPH;
4. Merekap semua setoran baik dari kelurahan maupun wajib pajak via Bank kemudian dilaporkan secara rutin (setiap hari Sabtu) kepada camat;
5. Menyiapkan laporan perkembangan penyampaian SPPT, realisasi dan permasalahan kepada lurah untuk dilaporkan kepada camat;
6. Untuk memudahkan dalam mengetahui jumlah setoran yang telah dilakukan, hendaknya setiap penyettor ke Bank harus menggunakan lembar pengantar rangkap tiga diisi secara lengkap antara lain :
 - * Jumlah global yang disetorkan
 - * Jumlah wajib pajak
 - * Jumlah setoran per-lingkungan
 - * Jumlah keseluruhan setoran sampai dengan hari ini

III. Pelaporan

1. Lurah diwajibkan setiap minggu (hari Sabtu) melaporkan hasil penerimaan SPPT (dilampiri struk/sobekan SPPT),

- realisasi pemasukan dan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis kepada camat;
2. Setiap pembuatan laporan harus menyertakan lembar pengantar/DPH sebagai hasil pungutan dari petugas yang disetorkan;
 3. Untuk mengetahui pemasukan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan secara pasti hendaknya dibedakan antara hasil pungutan kelurahan dan wajib pajak yang langsung ke Bank menggunakan contoh terlampir.

IV. Permasalahan

1. Didalam penelitian ulang yang dilakukan oleh lurah bersama kepala lingkungan/petugas apabila menjumpai SPPT yang keliru :
 - a. Salah Nama
 - b. Alamat tidak jelas
 - c. Obyek tidak ada
 - d. Dobel Anslah
 - e. Salah Luas/klas
 - f. Sarana umum

Pada huruf a sampai f diinventarisir kemudian dilaporkan secara kolektif ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan blangko model DPD ditandatangani lurah dan diketahui oleh camat dengan disertai copy data pendukung keabsahan data yang dimintakan pembetulannya.

2. Perlu diperhatikan setiap pengajuan permasalahan secara kolektif yang lewat tanggal yang ditentukan tidak akan dilayani dan sesudah tanggal yang ditetapkan KP.Pajak Bumi dan Bangunan hanya dapat menerima kekaliruan data SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :



a. Keberatan

Keberatan harus diajukan secara tertulis oleh wajib pajak ke KP Pajak Bumi dan Bangunan dengan melampirkan :

- * -Sertifikat;
- * Akta jual beli;
- * Ijin Mendirikan Bangunan;
- * atau surat-surat lain yang berkaitan dengan kepemilikan hak;

b. Pengurangan

Karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada kaitannya dengan subyek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya.

Misalnya :

Apabila data dalam SPPT sudah benar tapi wajib pajak nyata-nyata tidak mampu membayar, diajukan dengan batas waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak dengan melampirkan data-data yang ada kaitannya dengan penghasilan subyek pajak yang diketahui oleh lurah.

- c. Untuk diketahui, setiap pengajuan baik kolektif maupun perseorangan hanya dilayani melalui PST (Pelayanan Satu Tempat) di KP Pajak Bumi dan Bangunan tanpa dipungut biaya.

V. Penyuluhan/ Motivasi

- * Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepala kelurahan/ kepala lingkungan/petugas diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan secara umum;
- * mengikutsertakan/memfungsikan kelembagaan yang ada dimasyarakat agar dapat bekerja sama dan membantu dalam mensukseskan target penerimaan yang telah dijadwalkan;

- * Upaya lain yang harus dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar perlu penyebarluasan informasi kepada wajib pajak betapa pentingnya dana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan, diharapkan wajib pajak dapat membayar lebih awal tanpa menunggu batas waktu jatuh tempo

VI. Evaluasi

- * Untuk mengetahui sampai sejauhmana hasil kegiatan yang telah dicapai petugas, setiap minggu sekali lurah mengadakan evaluasi dan rencana selanjutnya yang perlu segera diselesaikan;
- * Melaporkan hasilnya kepada camat;
- * Evaluasi ditingkat kecamatan diadakan setiap hari Sabtu.

2.5 Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang

2.5.1 Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Status/ Kedudukannya Di dalam Pemerintahan Kelurahan

Tabel 7. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang

No.	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	26 orang
2.	Sukarelawan	28 orang
3.	Rollstat	10 orang
4.	Ulu-ulu	1 orang
Jumlah		65 orang

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Data tersebut menunjukkan bahwa aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari orang-orang dengan status yang berbeda-beda, misalnya yang dimaksud dengan pegawai negeri

sipil disini adalah staf kelurahan yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, selain juga sukarelawan dan rollstat yang diperbantukan dikantor kelurahan, serta ulu-ulu atau petugas yang mengurus masalah pengairan.

2.5.2 Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 8. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	Prosentase
1.	SLTA	31 %
2.	SLTP	19 %
3.	SD	50 %
Jumlah		100 %

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Tabel 6 menunjukkan bahwa aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah, dalam hal ini penulis mengkategorikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai tingkat pendidikan yang paling rendah yang ditunjukkan dari prosentase untuk pendidikan Sekolah dasar termasuk kategori paling tinggi, sedangkan untuk kategori pendidikan SLTA/ sederajat dengan prosentase yang cukup atau sedang (31%) dan prosentase terkecil adalah pendidikan SLTP (19%).

Dari tingkat pendidikan formal yang mereka peroleh menunjukkan bahwa masih diperlukan faktor penunjang lain yang mendukung peningkatan kemampuan aparat tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diarahkan pada pencapaian produktivitas dari masing-masing aparat pemungut pajak tersebut.

2.5.3 Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Lama Kerja (Pengalaman Kerja)

Komposisi aparat menurut pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Komposisi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Lama Kerja (Pengalaman Kerja)

No.	Lama Kerja	Jumlah	Prosentase
1.	1- 5 tahun	6	9
2.	6 - 10 tahun	20	31
3.	> 11 tahun	39	60
Jumlah		65	100

Sumber :

Pengalaman kerja aparat menunjukkan bahwa tingkat pengalaman kerja aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah tinggi. Hal ini berpengaruh dalam pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan apresiasi seorang pegawai/aparat pada tugas-tugasnya, baik dari daya kreasi maupun kecakapannya.

3.4 Karakteristik Informan

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif digunakan informan (key person) dan bukan responden.

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mempunyai pengetahuan dan informasi yang diperlukan tentang sesuatu yang diteliti. Informasi tidak dibatasi terlebih dahulu sehingga bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang harus diperoleh. Untuk memahami permasalahan yang ada, penelitian ini mengutamakan pandangan emik, dalam arti sudut pandang partisipan yang diutamakan meskipun tidak mengabaikan pandangan peneliti sendiri. Berdasarkan realitas

sosial budaya yang maknawi dan subyektif perspektif, Sanapiah (1990: 56) menyatakan:

Karena penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas sosial yang bersifat unik, kompleks dan ganda, padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi. Karenanya pula kegiatan penelitian seharusnya secara sengaja memberi informasi seluas mungkin ke arah keragaman variasi yang ada.

Pendekatan yang memandang bahwa realitas sosial yang unik, kompleks dan ganda ini mengandung arti bahwa suatu realitas sosial mempunyai kekhasan sendiri yang berbeda pada situasi dan kondisi yang berlainan yang dapat dipandang dari berbagai sudut dan subyeknya. Masing-masing pihak tersebut tetap memberikan kontribusi yang berarti guna memahami makna dan hakikatnya. Pemilihan informan atau situasi tertentu dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive (bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variabel-variabel yang ada atau elemen-elemen yang ada.

Dalam penelitian ini informan penelitian terdiri dari 5 (lima) orang, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang dari aparat pemungut sendiri dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda serta dari kelurahan dengan kondisi yang juga berbeda, dan 2 (dua) orang dari pihak yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yaitu dari pihak Dipenda dan dari Kelurahan yang mewakili 8 (delapan) kelurahan. Untuk memudahkan penyebutan kepada informan yang berasal dari aparat pemungut akan diberi inisial aparat A, B, dan C. Sedangkan informan diluar aparat pemungut akan diberi inisial masing-masing aparat D dan E, masing-masing dengan perincian identitas sebagai berikut:

1. Aparat A adalah petugas pemungut sekaligus staff kelurahan dengan latar pendidikan SLTP
2. Aparat B adalah petugas pemungut merangkap sebagai kepala lingkungan dengan latar pendidikan SD (Sekolah Dasar)
3. Aparat C adalah petugas pemungut sekaligus staff kelurahan dengan latar pendidikan SMA (Sekolah Menengan Atas)
4. Aparat D adalah dari Dipenda Kecamatan Patrang sekaligus berfungsi sebagai unsur pelaksana serta pengawas dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5. Aparat E adalah Lurah dari salah satu kelurahan di Kecamatan Patrang
6. Aparat F adalah dari Wajib pajak di Wilayah Kecamatan Patrang

III. PENYAJIAN DATA

3.1 Pengantar

Untuk mempermudah kegiatan analisis, data-data yang telah terkumpul harus disajikan secara teratur dan sistematis sesuai dengan urutan variabel penelitian..

Berdasarkan pada permasalahan penelitian yaitu Pengaruh produktivitas aparat pemungut pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang, maka variabel mandiri penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

3.2 Variabel Produktivitas Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Aparat pemerintahan kita masih belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Kelemahan dalam sistem informasi, kualitas dan proporsi tenaga profesional dalam formasi pegawai yang diidentifikasi dari kecilnya jumlah dan tenaga sarjana.

Permasalahan dan tantangan tersebut diatas menggambarkan krusialitas dan kompleksitas masalah pembangunan yang harus kita hadapi dewasa ini dan pada waktu-waktu yang akan datang.

Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sektor dalam Pendapatan Asli Daerah (Bantuan Pemerintah Pusat), sangat diperhatikan sekali kualitas aparatnya. Kartasasmita (dalam Kaho, 1996: 48) mengatakan tentang perlunya kualitas aparat sebagai berikut:

Dalam rangka mengefektifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditingkatkan produktivitas aparaturnya. Produktivitas dalam hal ini adalah kemahiran dan kemampuan melaksanakan tugas dibidang pemungutan antara lain penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan memberikan pengaruh yang besar sekali terhadap efektifitas atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut aparat A adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan wajib pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak pada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya ke Bank, Kantor Pos dan Giro.

Sementara itu berkaitan dengan perlu diadakannya kegiatan pemungutan pajak, aparat D menyatakan bahwa kegiatan pemungutan yang dilaksanakan oleh aparat pemungut dari rumah-ke rumah ternyata memang masih diperlukan di Kecamatan Patrang, karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan termasuk tinggi akan tetapi kesadaran dalam hal membayar pajak masih perlu dipupuk dan dibenahi sehingga perlu adanya pembinaan dan penyuluhan secara khusus mengenai pentingnya membayar pajak. Dari sini mulai disadari bahwa keberadaan aparat pemungut pajak tidak hanya sebagai petugas pemungut dalam arti sempit tetapi juga sebagai petugas penyuluh dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan aparat pemungut disini seperti diungkapkan oleh aparat D adalah aparat/petugas yang disertai tugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II lengkap dengan perincian tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.

Aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemungutan dituntut untuk menjadi aparat yang handal dan siap pakai baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Seperti dikemukakan oleh salah satu aparat E yang menyatakan bahwa pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan disegala bidang, untuk menunjang terwujudnya proiritas tersebut perlu adanya persiapan sejauhmana sarana dan prasarana serta kualitas aparatur yang terlibat secara langsung menangani masalah tersebut.

Pendapat tersebut juga didukung oleh aparat C yang juga menyatakan bahwa karena dalam kenyataan yang sesungguhnya aparat pemungut tidak hanya berfungsi sebagai petugas yang memungut pajak dari rumah ke rumah tetapi juga sekaligus sebagai penyuluh dalam rangka pendekatan dan penyadaran masyarakat umum untuk mengerti betapa pentingnya membayar pajak, sehingga dituntut untuk berkemampuan dan mampu membaca situasi perkembangan dan keberadaan masyarakat dalam arti ia dituntut untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang homogen baik tingkat pendidikan maupun kehidupan sosial ekonominya.

Aparat E juga mendukung pendapat tersebut bahwa "Bentuk-bentuk peningkatan produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya dalam hal peningkatan kemampuan akademis saja tetapi aparat juga dituntut mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Lebih lanjut aparat B menyatakan bahwa selain mempunyai kemampuan dalam arti akademis, kualifikasi lain yang diperlukan adalah adanya pengalaman. Ia berpendapat bahwa apabila mereka (aparat pemungut pajak) telah terjun kelapangan

langsung dan memungut pajak yang mereka hadapi bukan lagi sekedar wajib pajak saja akan tetapi yang mereka hadapi adalah homogenitas masyarakat. Mereka juga harus menyadari bahwa semua sikap yang dilakukannya dalam menghadapi pekerjaannya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Secara global dapat digambarkan bahwa berdasarkan data yang penulis peroleh menunjukkan 50% aparat pemungut pajak hanya berpendidikan Sekolah Dasar, 31% berpendidikan SLTA dan 19% berpendidikan SLTP.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan para aparat pemungut menyatakan bahwa kegiatan pemungutan pajak merupakan aktivitas keseharian yang dilakukan selain aktivitas rutin lainnya. Sehingga frekuensi pemungutan yang dilakukan juga tergantung pada kegiatan rutinnnya. Misalnya aparat pemungut yang sekaligus sebagai staf kelurahan maka kegiatan pemungutannya tergantung pada terselesaikannya tugas-tugasnya di kantor kelurahan. Selain itu pemungutan pajak juga harus melihat kondisi waktu ada tidaknya wajib pajak dirumah. Seperti diungkapkan oleh aparat C bahwa apabila pemungutan dilakukan dipagi hari wajib pajak lebih sering tidak ada ditempat karena bekerja. Sebagai contoh pagi hari baik pegawai, petani maupun pedagang lebih sering tidak ada dirumah, hal ini berarti kegiatan pemungutan baru bisa dilakukan setelah jam kerja mereka usai. Hal tersebut juga dibenarkan oleh informan F yang menyatakan bahwa kebanyakan wajib pajak pada waktu pagi hari lebih banyak tidak berada dirumah karena aktivitas rutin mereka sehingga aparat pemungut pajak juga harus bisa menyesuaikan waktu pemungutan dengan situasi dan kondisi masyarakat atau wajib pajak.

Frekuensi pemungutan aparat pemungut pajak apabila digambarkan secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Frekuensi Pemungutan PBB

No	Status	Jam/hari
1.	Pegawai Negeri Sipil	5
2.	Sukarelawan	6-7
3.	Rollstats	6-7
4.	Ulu-ulu	6-7

Sumber: Data Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa aparat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai staf kelurahan mempunyai frekuensi penarikan lebih sedikit dibandingkan dengan status lainnya, dengan asumsi bahwa selain kegiatannya sebagai aparat pemungut mereka juga mempunyai tugas tetap di kantor kelurahan masing-masing. Sedangkan aparat yang berstatus sukarelawan, rollstats maupun ulu-ulu rata-rata mempunyai waktu lebih banyak, meskipun tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak hanya bekerja sebagai petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan saja.

Indikator usaha selain dapat dilihat melalui frekuensi kegiatan pemungutan juga dapat dilihat melalui keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak yang diselenggarakan pihak atasnya, serta usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau masyarakat untuk membayar pajak, dalam hal ini usaha yang dilakukan adalah mengadakan siaran kebiling, melalui surat edaran dan melalui kelompok pengajian.

Seperti dikemukakan oleh aparat A yang juga didukung oleh aparat B dan C bahwa untuk memudahkan kegiatan mereka dalam memungut pajak salah satu upaya yang mereka lakukan

adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak membayar pajak. Hal ini mereka lakukan dengan mengadakan siaran keliling, melalui surat edaran maupun melalui pengajian-pengajian rutin.

Dipihak lain informan F menyatakan bahwa mereka (wajib pajak) sering mendapat penyuluhan baik yang bersifat formal maupun informal berkenaan dengan kewajiban membayar pajak. Ia juga menyatakan bahwa penyuluhan tersebut sebenarnya sangat berarti bagi mereka tetapi mereka juga mengharapkan aparat pemungut pajak maupun pihak yang terkait juga harus memahami kesulitan-kesulitan yang mereka alami, misalnya bagi petani dalam membayar pajak mereka harus menunggu saat panen, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa informan tersebut menunjukkan bahwa dari 65 orang aparat pemungut pajak tersebut 20% berusaha untuk meningkatkan frekuensi pemungutan, 30% berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan 50% mau mengikuti berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang diselenggarakan oleh pihak atasnya. Atau apabila digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Tabel Prosentase Usaha

No.	Item Usaha	%
1.	Menambah frekuensi pemungutan	20
2.	Meningkatkan kesadaran WP	40
3.	Mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kemampuan	40

Sumber: Data Primer

Selain kesulitan-kesulitan seperti disebutkan diatas, pada dasarnya masih banyak kesulitan lapangan lain yang dihadapi aparat pemungut pajak tersebut, antara lain para petani dalam

membayar pajaknya lebih dahulu harus menunggu masa panen, wajib pajak yang kadang-kadang tidak ada ditempat obyek pajak atau wajib pajak berkedudukan diluar kelurahan dimana obyek pajak berada, letak wajib pajak yang satu sama lain saling berjauhan maupun kesulitan operasional lainnya.

Untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi aparat pemungut tersebut pihak Dipenda bekerjasama dengan pihak kecamatan telah mengupayakan adanya intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang, upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Tingkat Kecamatan dan menunjuk petugas pemungut di Tingkat Lingkungan berdasarkan SK Camat Patrang tanggal 1 Mei 1998 No. 973/06/436.512/1998 tentang Intensifikasi Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menyusun mekanisme kerja dan Sistem Prosedur Administrasi penyampaian SPPT, penerimaan/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Membuat estimasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dalam tahapan masa tertentu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Menyusun jadwal/rincian kerja kegiatan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk mengefektifkan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga kegiatan pemungutan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sekaligus mampu memotivasi aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan untuk bekerja lebih produktif.

Aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan meskipun mempunyai motivasi yang tinggi tapi tidak mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk bekerja dengan baik tidak akan mendapatkan hasil, yang dalam hal ini adalah produktivitas, karena kemampuan dan pengalaman kerja seseorang memainkan peranan penting dalam perilaku dan kinerja seseorang.

Selain pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut upaya lain yang dilakukan untuk memotivasi aparat pemungut untuk lebih produktif dalam bekerja adalah adanya pemberian insentif, seperti disebutkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Kep-31/Pj.7/1986 dan No.973-561 tanggal 29-05-1986 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

Tujuan pemberian biaya pemungutan adalah untuk memberikan dorongan kepada aparatur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan menunjang pembinaan aparatur secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang lebih bersih dan berwibawa hingga dapat menggerakkan pembangunan.

Hal senada juga disampaikan aparat D bahwa insentif dengan ketentuan Realisasi X 9% X 15% tersebut dimaksudkan untuk mendorong aparat pemungut untuk meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri. Hanya saja dalam kenyataannya insentif tersebut sering tidak sampai pada petugas, seperti diungkapkan beberapa petugas yang menyatakan bahwa sejak dua tahun terakhir ini mereka tidak lagi menerima insentif.

Aparat D juga menambahkan bahwa selain dalam bentuk insentif motivasi juga diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan Dipenda dalam kegiatan pemungutan, meskipun dalam frekuensi

yang relatif sedikit tapi dimaksudkan juga dapat memotivasi dan kontrol terhadap kegiatan pemungutan pajak tersebut.

Seperti juga disebutkan dalam Laporan Hasil Lokakarya dalam rangka Insentififikasi Pendapatan Asli Daerah/Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993/1994 bahwa bentuk-bentuk pemberian motivasi antara lain adalah:

1. Pengawasan/evaluasi yang diadakan setiap satu minggu sekali terhadap petugas tingkat RT/RW, dua minggu sekali di tingkat kelurahan, sebulan sekali di tingkat kecamatan, dua bulan sekali di tingkat walikota, dan tiga bulan sekali di tingkat kabupaten Tingkat II Jember.
2. Pemberian perangsang/ penghargaan
 - Jasa pungut diberikan langsung kepada petugas pemungut dan penanggung jawab pada waktu evaluasi di tingkat kecamatan.
 - Penghargaan berupa piagam kepada petugas pemungut kelurahan yang berprestasi baik pada tingkat kecamatan maupun kotatiff.
3. Studi banding/Anjagsana

Secara periodik petugas dari kelurahan/ kecamatan mengadakan studi banding ke wilayah yang sukses tingkat Rt/RW/ Lingkungan/ Kecamatan untuk memperoleh masukan dan merangsang petugas pemungut pajak dan meningkatkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas.

Dari bentuk-bentuk pemberian motivasi tersebut, berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari berbagai sumber menunjukkan bahwa bentuk motivasi tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa pengawasan yang sekaligus evaluasi menunjukkan sudah 60% dilaksanakan, hal tersebut dilaksanakan karena kegiatan yang berhubungan dengan

pengawasan dan evaluasi tersebut merupakan suatu rutinitas yang sudah terjadwal, sehingga memang harus dilaksanakan. Sedangkan motivasi berupa pemberian perangsang dan penghargaan baru 35% dapat dilaksanakan, hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa aparat yang selama dua tahun terakhir tidak mendapat perangsang yang dalam hal ini adalah jasa pungut, sebaliknya pemberian penghargaan jarang diberikan. Sebaliknya pemberian motivasi dalam bentuk studi banding atau anjagsana petugas ternyata belum bisa dilakukan secara maksimal, meskipun dilakukan tetapi hanya sekedar kunjungan nonformal. Tabel berikut menunjukkan data tersebut secara rinci :

Tabel 12. Data Pemberian Motivasi

No.	Bentuk Motivasi	Pelaksanaan
1.	Pengawasan/ Evaluasi	60%
2.	Perangsang/ Penghargaan	35%
3.	Studi Banding/ Anjagsana Petugas	5%

Sumber: Data Primer

Data tersebut juga didukung oleh keterangan dari aparat lain yang juga menyatakan bahwa bentuk pemberian motivasi seperti tersebut diatas belum sepenuhnya dapat dilaksanakan seperti diungkapkan oleh aparat A yang menyatakan bahwa pemberian motivasi yaitu pemberian jasa pungut belum diberikan sebagaimana seharusnya, ia juga menyatakan bahwa antara jasa pungut yang mereka terima dengan pengorbanan yang mereka lakukan tidak seimbang.

3.3 Variabel Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sasaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah kemanfaatan yang keluar/ berasal dari bumi (misal hasil yang keluar dari bumi atau bangunan atas bumi). Oleh karena itu, obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Sedangkan

subyeknya adalah setiap orang/ badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pembaharuan perpajakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghapuskan keragu-raguan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana keefektifannya dalam masyarakat. Sedangkan perihal keberlakuan hukum didalam masyarakat menurut Soekanto seperti dikutip Harun (dalam *Justitia*, 1994: 1) dipengaruhi oleh faktor-faktor :

- a. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan atau menerapkan;
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum;
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Menurut aparat A yang didukung aparat lain menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan ialah melihat potensi yang telah dituangkan dalam ketetapan dan disampaikan pada wajib pajak, ditagih dan hasilnya masuk ke kas daerah.

Melihat potensi berupa obyek pajak yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan, ditagih dan realisasi pelunasannya, ternyata justru sektor perkotaan yang obyeknya sebagian besar sudah diidentifikasi dan diadministrasikan dengan baik penagihannya tidak berhasil melampaui target. Sebagai perbandingan adalah antara Kelurahan Gebang dan Jember Lor yang terkategori sebagai sektor perkotaan dan Kelurahan Jumerto serta Kelurahan Slawu mewakili sektor pedesaan, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan

No	Kelurahan	Target	Realisasi	%
1.	Sektor Perkotaan			
	Gebang	65.721.432	47.445.763	74,97
	Jember Lor	112.616.784	84.360.134	74,91
2.	Sektor Pedesaan			
	Slawu	13.177.466	10.716.256	81,32
	Jumerto	10.415.506	9.048.781	86,88

Sumber : Dipenda Kecamatan Patrang

Sedangkan tabel 5 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Patrang belum pernah mencapai target, yakni 63,21% setahun. Tahun 1995/1996 dari target Rp 206.593.309 hanya dicapai Rp 169.201.804, atau 81,90%, tahun 1996/1997 dari target Rp 303.543.595 dicapai Rp 213.779.542, atau 70,43%, tahun 1997/1998 dari target Rp 303.789.993 hanya dicapai Rp 206.741.862, atau 68,05%, dan tahun 1998/1999 dari target Rp 314.112.599 hanya capai Rp 208.674.450, atau 66,29%. Sedangkan untuk periode tahun 1999/2000 data terakhir yang penulis peroleh sampai Maret 2000 menunjukkan dari target Rp 330.948.441 hanya dicapai Rp 235.813.558, atau 72,49%, meski masa jatuh tempo sudah terlewati, yaitu bulan November.

Sebagaimana disebutkan dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bahwa untuk mengukur efektifitas atau keberhasilan tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan target waktu penarikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penarikan atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 14. Target Waktu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang periode Tahun 1999/2000

No.	Bulan	Target/ Sasaran
1.	April	Penyebaran SPPT
2.	Mei	15%
3.	Juni	30%
4.	Juli	45%
5.	Agustus	60%
6.	September	75%
7.	Oktober	90%
8.	November	100%

Sumber: Dipenda Kecamatan Patrang

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dengan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

1. Dari hasil analisis deskriptif mengenai produktivitas aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dilihat dari indikator motivasi, usaha dan kemampuan, menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda antara masing-masing indikator. Indikator motivasi sendiri mempunyai kecenderungan yang juga berbeda-beda, tergantung dari bentuk motivasi itu sendiri. Akan tetapi pada dasarnya bentuk-bentuk motivasi tersebut adalah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas. Indikator usaha sebagai tindak lanjut dari adanya motivasi menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti motivasi, artinya apabila aparat tersebut termotivasi untuk bekerja maka ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membentuk suatu kinerja yang lebih baik. Sedangkan indikator kemampuan mempunyai kecenderungan mendukung produktivitas, bukan menentukan. Jadi pada dasarnya ketiga indikator tersebut mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan produktivitas meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara realisasi dengan target. Hasil analisis menunjukkan adanya kesulitan realiasi mengikuti target yang ditentukan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi pula, peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, antara lain:

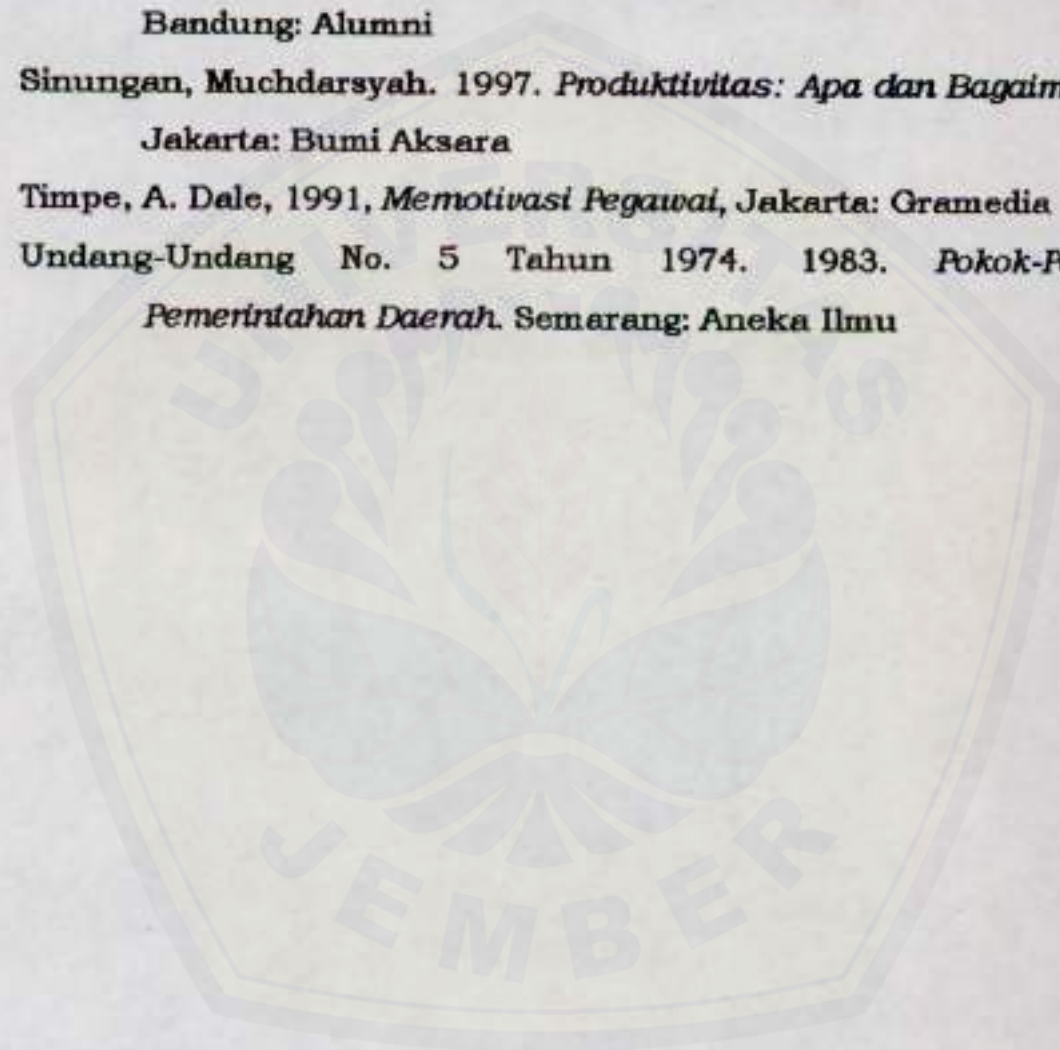
1. Untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pembinaan maupun pelatihan terhadap petugas/ aparat pemungut perlu lebih ditingkatkan, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak pada umumnya.
2. Pihak yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dalam hal ini adalah Dipenda serta pemerintah kecamatan tersebut untuk lebih memperhatikan aparat pemungut, baik kesejahteraan yaitu melalui pemberian insentif secara teratur, kemampuan maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka sehingga tujuan bersama yaitu tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Untuk dapat mencapai keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka usaha untuk memperoleh data yang obyektif mengenai obyek pajak perlu dilakukan secara intensif.
4. Penambahan jumlah personil dengan memperhatikan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk memudahkan pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

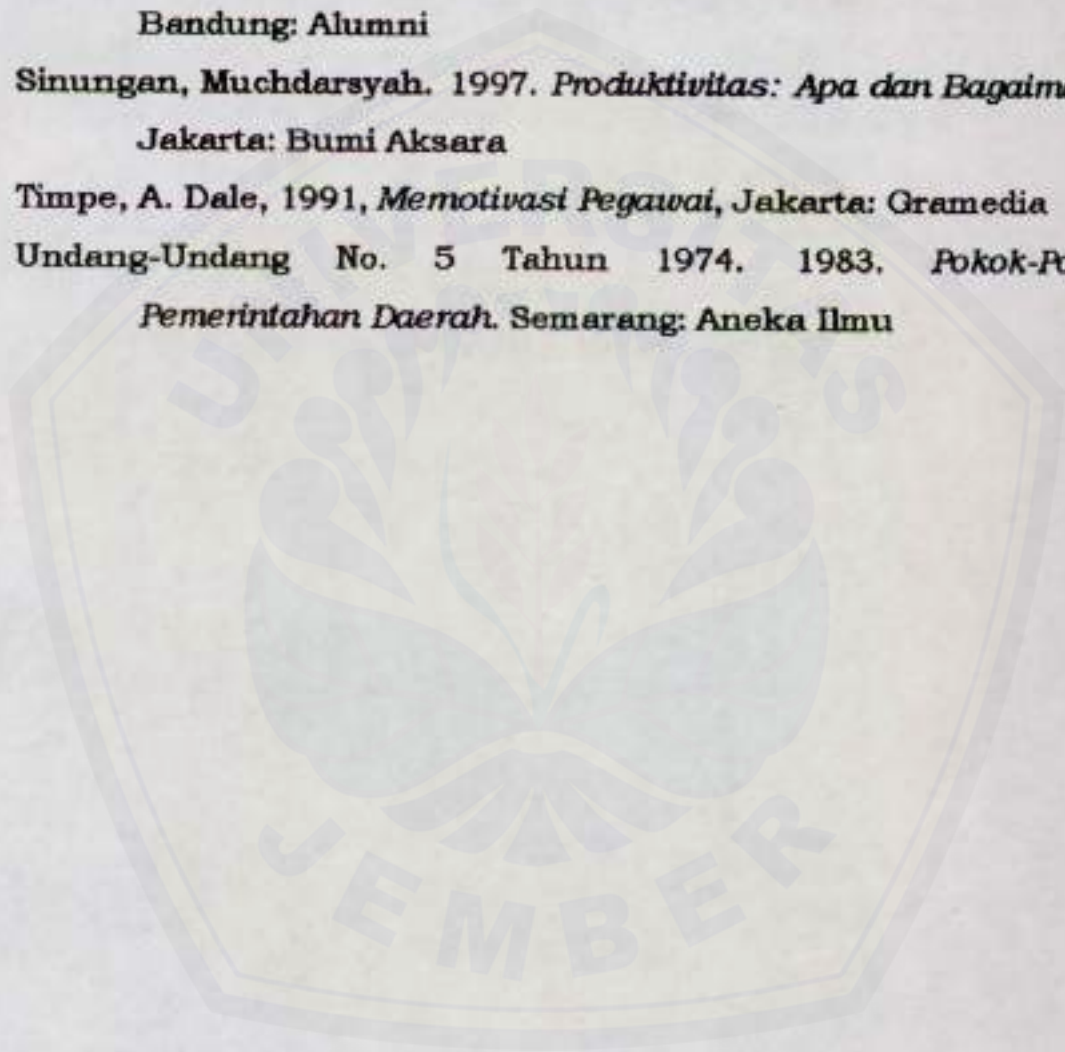
- Anonim. 1998. TAP MPR Nomor II Tahun 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Surakarta: PT. Pabelan
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsjad, Nurdjaman. Bambang Kusumanto . Yuwono Prawirosetoto. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia
- Djamaluddin, M. Arief. 1997. "Pembinaan dan Pemberdayaan Pegawai Negeri Tirjauan dari Segi Motivasi" . dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan (Edisi VI Oktober). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*. Malang: Erlangga
- Gellerman, Saul. W. 1994. *Motivasi dan Produktivitas*. Jakarta: LPPM
- Gibson. Ivancevich. Donnelly. 1997. *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Gomes, Faustino Cardoso. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Harun. 1994. "Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Propinsi Lampung". dalam Justitia No. 8
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metode Research II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Handayaniingrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Koentjaraningrat. 1976. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

- Manullang, M. 1987. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moenir, A.S.. 1995. *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung
- Moleong, MA, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munawir dkk. 1990. *Perpajakan Untuk SMA*. Yogyakarta: BPF
- Nasir, Muhamad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nitisemito, Alex S. 1980. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ravianto, J. 1985. *Produktivitas dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas
- Yusuf Suit. Almasdi. 1996. *Aspek Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Shobaruddin, M. Andy Fefta W. Dwi Atmanto. M. Sapari. 1997. "Produktivitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintah Desa". dalam *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 9 Agustus). No. 2. Jakarta: Universitas Brawijaya. hal 17-18
- Singarimbun, Masri. Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Soemitro, Rochmat. 1997. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco
- _____, 1986. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Eresco
- Steers, M. Richard. 1987. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

- Sudjadi, F.X. 1987. *Aspek Manusiawi Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Supranto, J.. 1988. *Metodologi Riset Dan Aplikasinya Dalam Riset Pemasaran*. Jakarta: JP3ES-UI
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Timpe, A. Dale, 1991, *Memotivasi Pegawai*, Jakarta: Gramedia
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Semarang: Aneka Ilmu



- Sudjadi, F.X. 1987. *Aspek Manusiawi Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Supranto, J.. 1988. *Metodologi Riset Dan Aplikasinya Dalam Riset Pemasaran*. Jakarta: JP3ES-UI
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Timpe, A. Dale, 1991, *Memotivasi Pegawai*, Jakarta: Gramedia
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 1983. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Semarang: Aneka Ilmu



PANDUAN PERTANYAAN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan apa yang pernah/sedang Bpk/ibu/Sdr punyai?
6. Berkenaan dengan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, kesulitan apa yang sering Bpk/Ibu/Sdr alami?
7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memahami istilah mengenai produktivitas, motivasi, insentif serta efektivitas?
8. Berapa insentif yang Bpk/Ibu/Sdr terima dari tugas memungut pajak tersebut.
9. Selain dalam bentuk uang insentif apa lagi yang Bpk/Ibu/Sdr terima?
10. Apakah pemberian insentif tersebut bagi Bpk/Ibu/Sdr mampu menunjang kegiatan pemungutan pajak?
11. Sejauhmana keterlibatan pihak Dipenda maupun pihak lain yang terkait dalam kegiatan pemungutan pajak tersebut.
12. Dalam sehari berapa jam Bpk/Ibu/Sdr memungut pajak?
13. Menurut Bpk/Ibu/Sdr sebagai pemungut pajak ini ada keuntungan yang diperoleh?
14. Apakah Bpk/Ibu/Sdr sering menghadiri pertemuan rutin di kecamatan?
15. Menurut Bpk/Ibu/Sdr apa maksud diadakannya pertemuan rutin tersebut?
16. Selain pertemuan rutin di kecamatan apakah pernah ada program khusus berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan pemungut pajak?
17. Berapa kali dalam 1 tahun program khusus itu dilaksanakan?

18. Menurut Bpk/Ibu/Sdr apakah kegiatan tersebut secara pribadi ada manfaatnya?
19. Berapa tanggungan keluarga Bpk/Ibu/Sdr?
20. Selain sebagai pemungut pajak, sambilan pekerjaan apa yang Bpk/Ibu/Sdr tekuni saat ini?





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 938 /J25.2/PG/99

13 Nopember 1999

Lampiran :

Perihal :

Pemohonan ijin mengadakan Penelitian

Kepada :

Yth, Sdr. Kakansospol
Pemda Kabupaten Tk.II Jember
di -
J E M B E R .

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan *ijin* mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM	: DEWI NURTATI / E1C195166
Dosen/Mahasiswa	: Fakultas Ilmu Sosial & Politik / ADM NEGARA Universitas Jember
Alamat	: Jl. Jawa VI A / 4 Jember
Judul Penelitian	: Produktifitas Aparat Pemungut pajak Sebagai Selah Satu Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Penerimaan PBB
Di Daerah	: Wilayah Kec. Palrang Kab. Jember
Lama Penelitian	: 4 Bulan

Untuk pelaksanaan *penelitian* tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan *ijin* kepada mahasiswa tersebut dalam mengadakan *penelitian* sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. Dosen/Mahasiswa ybs.

KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Kartini No 3 TELP. 487732

J E M B E R

Jember, 16 Nopember 1999

Nomor : 072 / 456 / 330.36 / 1999.
Tingkat : Penting
Sifat : -
Materi : SURVEY / RESEARCH

K e p a d a
Yth. Sdr. CAMAT PATRANG

DI
J E M B E R

Dasar surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Universitas
Jember tanggal 13 Nopember 1999
, Perihal permohonan ijin Survey/Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan
Survey/ Research dimaksud diminta kepada Saudara untuk
memberikan bantuan berupa data/ keterangan yang diperlukan
oleh :

Nama : DEMI NURTATI
Alamat : JL. JAWA VI A / 4 JEMBER
Pekerjaan : MAHASISWA FAK. ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIV. JEMBER
Keperluan : RESEARCH / PENELITIAN
Waktu : 16 NOPEMBER 1999 S/D 16 MARET 2000
Peserta : -
Judul : PRODUKTIFITAS APARAT PEMUNGUT PAJAK SEBAGAI SALAH SATU
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN PBB.

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan
terima kasih.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TK II JEMBER
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK



Drs. G. GIYONO SUTOMO

REKOMENDASI : Kepada Yth.

Sdr. Kapolres Jember;
Sdr. Dan Dim 0824 Jember;
Sdr. Rektor Univ. Jember
Sdr.
Sdr.

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF JEMBER
CAMAT PATRANG

JL. SRIKOYO NO.100 TELP. 486110 JEMBER 68111

Patrang, Juni 2000

Nomor : 072/407/1436.512/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan adanya
Penelitian

K e p a d a
Yth. Sdr. Ketua Lembaga
Penelitian Univ.
Negeri Jember
di -

J E M B E R

Menunjuk surat Rekomendasi dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Jember tanggal 16 Nopember 1999 nomor 072/456/330.36/1999 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa :

N a m a : DEWI NURTATI
Alamat : Jl. Jawa VI-A/4 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian produktivitas Aparat Pemungut Pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Patrang, terhitung mulai tanggal 16 November 1999 s/d 16 Maret 2000.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



CAMA PATRANG

CAMAT
PATRANG

SUPRATNO

PENATA TINGKAT I

NIP : 510 100 711

CAMAT PATRANG

Jln. Srikoyo Nomor 100 Telp. 436040.Jember

Patrang, 14 Pebruari 2000

Nomor : 072/94/436.512/2000

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Kepala Kelurahan se

Lampiran : -

wilayah Kec. Patrang

Perihal : SURVEY/RESEARCH

di -

Berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 16 Nopember 1999 Nomor : 072/456/330.36/1999 perihal - Survey/Research.

Untuk kelancaran serta kesudahannya dalam pelaksanaan survey / research dimaksud, dimintah bantuan Saudara untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan oleh :

Nama : DEWI NURHANI
 Alamat : Jl. Jawa VI A/4 Jember
 Pekerjaan : Mahasiswa Pispip Univ. Jember
 Waktu : 16 Nopember s/d 16 Maret 2000
 Judul : Produktifitas aparat pemuncut pajak sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan PDB.

Desakian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

